



BUPATI SRAGEN

Yth.

1. Ketua DPRD Sragen;
2. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
3. Camat se-Kabupaten Sragen;

SURAT EDARAN

NOMOR : 000.7.1/ 1676/23/2025

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN
MUSRENBANG KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026
DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RKPD KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2027

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana pembangunan tahunan atau disebut dengan RKPD.

RKPD disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, *top down* (atas→bawah) dan *bottom up* (bawah→atas) serta orientasi substansi secara Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial (HTIS) dengan berpedoman pada dokumen perencanaan di atasnya, kebijakan Pemerintah Pusat, dinamika lingkungan strategis yang berkembang dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Proses penyusunan RKPD membutuhkan koordinasi Perangkat Daerah (PD) dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang yaitu: tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten dengan sumber data antara lain dari usulan aspirasi masyarakat di desa/kelurahan dan usulan hasil reses seluruh anggota DPRD Kabupaten.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Proses musrenbang Tahun 2026 merupakan rangkaian proses musyawarah dan pembahasan untuk menyusun RKPD tahun 2027 melalui beberapa tahapan:
 - a. **Musrenbang Desa/Kelurahan pada minggu ke-1 Januari 2026;**

- b. **Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2027** direncanakan pada **Minggu ke-3 Januari 2026**;
- c. **Musrenbang Kecamatan** direncanakan pada **Minggu ke-1 Februari 2026**;
- d. **Forum PD/Gabungan PD** direncanakan pada **Minggu ke-3 Februari 2026**;
- e. **Musrenbang Kabupaten** direncanakan pada **Minggu ke-2 Maret 2026**;
2. **Camat diminta kerjasamanya** untuk:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Desa/Kelurahan di wilayahnya untuk menyelenggarakan musrenbang desa/kelurahan **paling lambat dalam minggu ke-1 Januari 2026**.
 - b. Desa/kelurahan **yang sudah melaksanakan musrenbang** wajib melakukan **input usulan hasil musrenbang** desa/kelurahan ke aplikasi **Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI)** paling lambat pada **Minggu ke-2 Januari 2026** dengan alamat web <https://sipd-ri.kemendagri.go.id>.
 - c. **melaksanakan musrenbang kecamatan serta proses verifikasi usulan** hasil musrenbang desa/kelurahan di wilayahnya melalui aplikasi SIPD-RI Tahun 2026 dalam Minggu ke-1 Februari 2026;
 - d. Melaporkan pelaksanaan **musrenbang kecamatan** ke Bapperida cq. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah **paling lambat dalam Minggu ke-3 Januari 2026**.
3. **Monitoring** musrenbang kecamatan oleh **Bapperida dan Tim** pada tahun 2026 **tidak dilakukan dengan kunjungan ke lokasi** musrenbang, namun dilakukan **melalui aplikasi SIPD-RI**;
4. **Khusus untuk pokok-pokok pikiran DPRD**, agar dapat disampaikan/diinput ke aplikasi SIPD melalui akun masing-masing anggota DPRD mulai **Minggu ke-2 Januari 2026 s.d Minggu ke-3 Februari 2026**.
5. Tata Cara Penyelenggaraan Musrenbang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2026 disusun sebagai acuan dalam proses dan penyusunan dokumen perencanaan program/kegiatan di Kabupaten Sragen untuk tahun 2027 secara lengkap terlampir.

Demikian untuk menjadi perhatian bersama dan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sragen, 4 Desember 2025

Bupati Sragen,



Tembusan Kepada Yth.:

1. Wakil Bupati Sragen;
2. Sekretaris Daerah Kab.Sragen;
3. Arsip.

**TATA CARA PENYELENGGARAAN
MUSRENBANG KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026
DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RKPD KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2027**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Tahunan atau disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas bawah dan bawah atas serta orientasi substansi secara Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial (HTIS) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kebijakan Pemerintah Pusat, dinamika lingkungan strategis yang berkembang dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Setiap proses penyusunan dokumen tersebut memerlukan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (PD) dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada semua tingkatan, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat.

RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2027 menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027, berupa program/kegiatan Perangkat Daerah atau lintas Perangkat Daerah, sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan RAPBD, diperlukan masukan dari desa/kelurahan, kecamatan dan Perangkat Daerah melalui penyelenggaraan musrenbang desa/kelurahan, dan kecamatan untuk menyelaraskan RKPD Kabupaten, RKPD Provinsi dan RKP yang akan mempengaruhi kegiatan pembangunan yang terkait dengan pendanaan kegiatan dari pemerintah vertikal.

Tahapan proses penyusunan dokumen perencanaan daerah tahun 2027 sebagai langkah paralel dan lanjutan dari proses musrenbang desa/kelurahan untuk kegiatan pembangunan tahun 2027 sebagai berikut.

1. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 : M1 Nopember 2025
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2027 : M2 Nopember 2025

3. Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah : M1 Januari 2026
4. **Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD**
Tahun 2027 Kabupaten Sragen : **M3 Januari 2026**
5. Musrenbang Kecamatan : M1 Februari 2026
6. Forum Gabungan PD : M3 Februari 2026
7. Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2027 : M1 Maret 2026
8. **Musrenbang RKPD Kabupaten** : **M2 Maret 2026**
9. Penyusunan Rankir RKPD : M3 Maret 2026
10. Harmonisasi Raperbup ke Kanwil Kumham : M4 Maret 2026
11. Reviu APIP Rankhir RKPD 2027 : M3 April 2026
12. Tinjau Reviu APIP Rankhir RKPD 2027 : M2 Mei 2026
13. Fasilitasi Provinsi Rankhir RKPD 2027 : M1 Juni 2026
14. Penetapan Perkada RKPD Tahun 2027 : M2 Juni 2026

B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN MUSRENBANG

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah Kabupaten Sragen.

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2027

RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2027 merupakan tahun ke-2 periode RPJMDs Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sragen Tahun 2027 Fokus diarahkan pada tema **“Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan ditopang SDM unggul, tata kelola dinamis dan pembangunan wilayah terintegrasi”**.

Dengan memperhatikan arah kebijakan Kabupaten Sragen Tahun 2027, upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut adalah:

1. **Pengembangan UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif** melalui akses pembiayaan, pemasaran digital, dan pendampingan.
2. **Mendorong investasi** yang ramah lingkungan dan berorientasi pada penciptaan lapangan kerja lokal.
3. **Mendorong sinergi** antara pemerintah daerah, perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah.
4. **Mengembangkan sektor unggulan daerah berbasis potensi lokal** seperti pertanian modern, pariwisata berkelanjutan, dan industri pengolahan.

5. **Peningkatan daya tarik pariwisata** berbasis karakteristik dan potensi daerah seperti pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga.
6. **Penguatan Sumber Daya Manusia Unggul** melalui pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi profesi untuk memperkuat daya saing tenaga kerja.
7. **Memperkuat literasi** digital, kewirausahaan, dan soft skills bagi angkatan kerja muda.
8. Mengimplementasikan **sistem pemerintahan berbasis digital** (*e-government*) untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik.
9. Memperkuat **perencanaan pembangunan berbasis data dan evidence-based policy**.
10. Mendorong **pemerataan pembangunan antara wilayah** perkotaan dan perdesaan.

Pada tahap kedua ini juga diarahkan pada **“Sragen yang berkelanjutan”** dalam dalam mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah meliputi:

1. **Peningkatan Sumber Daya Manusia** yang Berkarakter Tangguh, Adaptif, dan Berbudaya;
 - a) Pemerataan peningkatan sarana prasarana sekolah
 - b) Peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam penguasaan teknologi digital dan penyusunan media pembelajaran interaktif
 - c) Peningkatan pendidikan karakter melalui penanaman nilai agama dan budaya, implementasi kurikulum yang adaptif serta penguatan sekolah inklusi
 - d) Peningkatan akses dan pemerataan kesempatan pendidikan melalui pemerataan layanan pendidikan, serta evaluasi strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS);
 - e) Peningkatan kualitas data dan pemetaan objek budaya lokal Sragen, termasuk tradisi, situs sejarah, dan kesenian
 - f) Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan seperti sanggar seni, balai budaya, dan ruang kreatif untuk generasi muda
 - g) Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan primer dan lanjutan
 - h) Peningkatan kompetensi SDM kesehatan
 - i) Peningkatan kepesertaan aktif untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
 - j) Peningkatan akses layanan kesehatan primer dan lanjutan di wilayah pinggiran dan perdesaan Sragen
 - k) Pengembangan sistem informasi kesehatan daerah yang terintegrasi dan berbasis digital
 - l) peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter SDM
 - m) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pemetaan atlet potensial, pemetaan sarpras olahraga, serta pemetaan cabang olahraga unggulan
 - n) Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan.

- o) Peningkatan tata kelola literasi melalui koordinasi antar stakeholder, pelibatan komunitas literasi dalam penyadaran gemar membaca masyarakat;
- p) Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan;
- q) Peningkatan pembangunan berbasis gender;
- r) Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak;
- s) Peningkatan ketahanan keluarga.

2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Gesit, Responsif dan Kolaboratif;

- a. Peningkatan kinerja pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat secara daring dan terintegrasi dan optimalisasi pelayanan hingga tingkat kecamatan/desa.
- b. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja, riset dan manajemen risiko berbasis kinerja serta integritas
- c. Peningkatan tata kelola data yang terintegrasi dan berbasis sistem informasi.
- d. Penguatan ekosistem riset dan inovasi pada sektor unggulan daerah serta penguatan kolaborasi riset dan inovasi.
- e. Peningkatan kualitas manajemen ASN, asesmen kinerja dan kompetensi ASN sebagai dasar distribusi dan rotasi jabatan berbasis kebutuhan.
- f. Peningkatan kapasitas aparatur berbasis gap analysis antara kompetensi yang dimiliki dan kompetensi yang dibutuhkan, disertai nilai-nilai etika dan integritas
- g. Pemanfaatan teknologi dalam meminimalisir celah korupsi dan memperkuat akuntabilitas kinerja
- h. Peningkatan integritas dan peran partai politik dalam memperkuat demokrasi lokal dan pembangunan berkelanjutan.
- i. Penguatan penyusunan kebijakan daerah berbasis analisis hukum yang responsif terhadap dinamika sosial dan aspirasi warga
- j. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui inovasi digitalisasi pajak dan retribusi serta pengelolaan aset daerah.
- k. Peningkatan kualitas kapasitas fiskal dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dan peningkatan kualitas belanja daerah.
- l. Pemanfaatan dashboard monitoring kinerja dan keuangan yang real-time untuk mempercepat respons pengambilan Keputusan
- m. Eksplorasi pembiayaan kreatif seperti kerjasama publik-swasta, social finance, dan pendanaan berbasis hasil
- n. Peningkatan kualitas kelembagaan yang efektif dan berdaya saing
- o. Penguatan kelembagaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; serta mendorong inovasi layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- p. Peningkatan kualitas pengelolaan digitalisasi manajemen kearsipan
- i. Peningkatan kualitas aparatur daerah melalui pelatihan etika pelayanan publik, inovasi, dan keterbukaan informasi

3. Peningkatan Perekonomian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan;

- a. Peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan dan pemberdayaan pelaku industri lokal;
- b. Peningkatan produktivitas sektor perdagangan
- c. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif
- d. Peningkatan ekosistem investasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif
- e. Peningkatan kolaborasi multipihak dalam pembangunan ekonomi
- f. Peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi daerah
- g. Peningkatan kerja sama dan pengembangan potensi pariwisata.
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah.
- i. Peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM)
- j. Peningkatan daya saing wirausaha baru
- k. Peningkatan nilai tambah dan pemasaran produk unggulan daerah
- l. Peningkatan pertumbuhan penanaman modal
- m. Pengembangan pariwisata sebagai motor ekonomi inklusif berbasis kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat seperti Situs Sangiran, Gunung Kemukus, Waduk Kedung Ombo, Desa Wisata Batik dan lainnya
- n. Penguatan digitalisasi sektor pariwisata untuk menjangkau pasar yang lebih luas serta peningkatan daya saing destinasi
- o. Penguatan identitas destinasi wisata Sragen
- p. Peningkatan sinergi antar pelaku usaha, pemerintah, dan komunitas dalam tata kelola destinasi
- q. Penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan UMKM
- r. Peningkatan aksesibilitas menuju Sangiran dan integrasi dengan jalur wisata Solo–Karanganyar–Sragen untuk memperkuat kunjungan lintas daerah
- s. Digitalisasi promosi dan manajemen pariwisata melalui integrasi platform reservasi, informasi destinasi, dan media promosi digital
- t. Diversifikasi ekonomi lokal, UMKM halal, dan digitalisasi sistem keuangan
- u. Peningkatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital
- v. Penguatan kemitraan strategis dengan kampus melalui program magang mahasiswa, pelatihan SDM desa wisata (content creator), serta pendampingan tata kelola destinasi dan usaha pariwisata
- w. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terintegrasi hulu hilir melalui penguatan tata kelola persampahan dan pencegahan pencemaran.
- x. Peningkatan infrastruktur sanitasi air limbah domestik penguatan infrastruktur akses air minum yang dikelola secara aman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya air.
- y. Penguatan integrasi rencana tata ruang dan rencana sektoral lainnya
- z. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan

- aa. Peningkatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air guna meningkatkan ketersediaan air baku
- bb. Peningkatan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
- cc. Peningkatan kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat bencana;
- dd. Penguatan keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat dengan peningkatan peran satlinmas, tokoh agama, dan pemuda
- ee. Peningkatan kondusivitas dan stabilitas wilayah melalui sinergita lintas daerah, pemetaan daerah rawan, penegakan hukum daerah, serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan gangguan ketertiban

4. Peningkatan masyarakat yang sejahtera

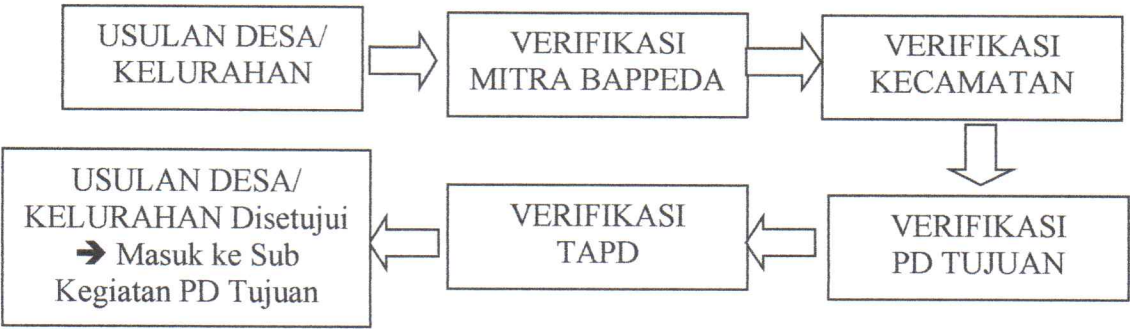
- a. Peningkatan akses pelayanan dasar untuk mewujudkan transformasi desa.
- b. Peningkatan peran BUMDes dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Peningkatan kualitas tata kelola dan kompetensi SDM Lembaga desa
- d. Peningkatan kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan
- e. Peningkatan peran masyarakat desa/kelurahan dan penguatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan termasuk integrasi kegiatan Posyandu untuk mendukung SPM
- f. Peningkatan profesionalisme aparatur desa melalui peningkatan kapasitas, pelatihan, dan sertifikasi.
- g. Peningkatan penyediaan jaminan sosial bagi lansia, difabel, dan keluarga miskin
- h. Peningkatan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.
- i. Peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- j. Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja
- k. Pemerataan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat desa
- l. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas digital di seluruh wilayah Sragen untuk memudahkan akses informasi, pendidikan, dan pelayanan publik secara online
- m. Peningkatan Sistem Pendataan dan Basis Data Terpadu kemiskinan berbasis spasial/desa.
- n. Integrasi Data Sosial dengan Perencanaan Pembangunan
- o. Integrasi Program Lintas Perangkat Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan pengembangan inovasi desa sesuai potensi lokal.
- p. Mendorong inovasi desa sesuai potensi lokal.
- q. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
- i. Peningkatan Partisipasi dan Kemandirian Masyarakat Desa

II. MEKANISME PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TAHUN 2026 UNTUK PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2027

Proses perencanaan di Kabupaten Sragen tahun 2027 terdokumentasi dalam aplikasi terpadu nasional Sistem Informasi Pemerintahan Daerah-RI (SIPD-RI) dari Kemendagri. Aplikasi SIPD-RI berbasis nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor: 050-3708 tahun 2020, Kepmendagri Nomor: 050-5889 tahun 2021, serta Kepmendagri Nomor: 900.1.15.5-3406 tahun 2024. Sumber data dasar usulan sub kegiatan adalah dari masyarakat dan dari aspirasi/pokok-pokok pikiran DPRD.

Skema proses pengusulan tersebut sebagai berikut.

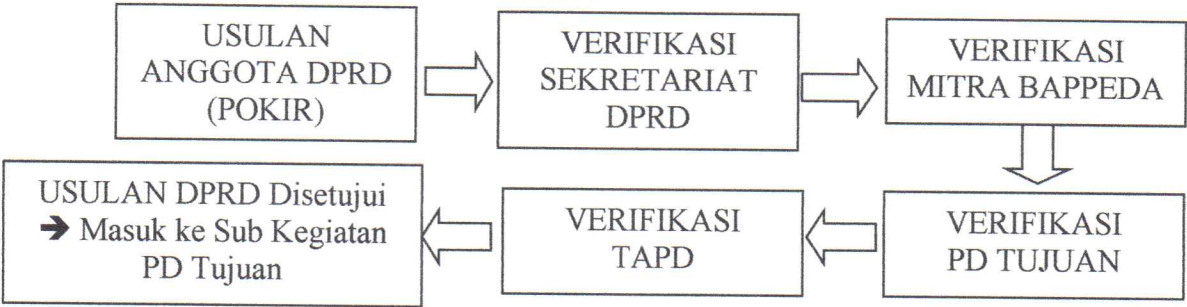
Gambar 1. Skema Proses Usulan dari Masyarakat



Usulan masyarakat dapat diinput oleh akun Desa/Kelurahan ke SIPD **mulai M2 Januari 2026** atau setelah sosialisasi input SIPD. Verifikasi **verifikasi Mitra Bappeda** mulai **M3 Januari 2026** untuk menata usulan pada sub kegiatan PD tujuan yang sesuai dan memfilter usulan kesesuaian lokasi (nama kecamatan dengan desa atau dukuhnya), calon penerimanya, serta kesiapan kelengkapan data dukung lainnya. Tahap selanjutnya adalah **verifikasi Kecamatan** mulai **M1 Pebruari 2026**. Tahap berikutnya adalah **Verifikasi PD** yang dilakukan tanggal **M2 Februari 2026** atau **setelah Forum Gabungan PD**. PD melakukan pencermatan dan sinkronisasi data dukung usulan dengan pihak pengusul dalam hal nama sub kegiatan, alamat lokasi serta calon penerima kegiatan.

Verifikasi Kecamatan dimulai pada saat hari penyelenggaraan musrenbang di tingkat kecamatan. Kecamatan hanya melakukan verifikasi terhadap usulan desa/kelurahan pada SIPD yang telah diverifikasi oleh Mitra Bappeda dan **tidak ada input usulan baru lagi pada musrenbang kecamatan**. Hasil verifikasi kecamatan akan diterima oleh PD tujuan sebagai bahan masukan Renja PD tahun 2027. Usulan tersebut disinkronisasikan antara kecamatan dan PD pada saat Forum Gabungan PD yang direncanakan di Pebruari 2026. Usulan yang diakomodasi ke dalam Renja PD selanjutnya akan disampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dilakukan pembahasan dan verifikasi TAPD. Usulan yang disetujui TAPD akan menjadi pra Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD dan akan diproses menuju KUA-PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2027.

Gambar 2. Skema Proses Pokir Anggota DPRD



Pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2027 diinput oleh masing-masing anggota DPRD ke SIPD melalui akun masing-masing anggota DPRD **mulai M2 Januari s.d M3 Pebruari 2026** atau setelah sosialisasi input SIPD. Tahapan verifikasi Pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2027 sebagai berikut.

1. Verifikasi **Sekretariat DPRD** mulai **M 3 Pebruari s.d M1 Maret 2026** untuk memfilter usulan guna mencegah adanya duplikasi usulan, kekeliruan lokasi (nama kecamatan dengan desa atau dukuhnya), calon penerimanya, serta kesiapan kelengkapan data dukung lainnya.
2. Verifikasi **Mitra Bappeda** mulai **M2 Maret 2026**, di mana Mitra Bappeda menata usulan pada sub kegiatan PD tujuan yang sesuai.
3. Tahap berikutnya adalah **Verifikasi PD** yang dilakukan setelah pelaksanaan Musrenbang Kabupaten yaitu pada **M1 April 2026**. PD melakukan pencermatan verifikasi lapangan dan sinkronisasi data dukung usulan dengan koordinasi Bapperida dan pihak aspirator(DPRD) dalam hal nama sub kegiatan, alamat lokasi serta calon penerima manfaat dan alokasi anggarannya.

Usulan yang telah masuk ke Rancangan Renja PD selanjutnya akan diteruskan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dilakukan pembahasan dan verifikasi, Tahapan ini dilaksanakan mulai **M2 s.d M4 April 2026**. Usulan yang disetujui akan menjadi RKA PD Tahun Anggaran 2027.

A. MUSRENBANG DESA dan MUSRENBANG KELURAHAN UNTUK RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027

Musrenbang desa. Tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan tingkat desa dilaksanakan berpedoman pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No.47 tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014. Namun demikian proses input usulan ke SIPD hasil musrenbang desa dilakukan di Minggu I Januari 2026.

Peserta Musrenbang desa dan kelurahan meliputi unsur: Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Kecamatan, BPD (untuk musrenbang desa), LPMK, lembaga adat, Tim Penggerak PKK, RT/RW, Karang taruna, wakil forum anak dan lembaga kemasyarakatan lainnya, organisasi keagamaan, organisasi wanita, unsur keterwakilan masyarakat, kelompok rentan termarginalkan, partai politik serta anggota DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi sesuai daerah pemilihannya.

Tujuan:

- a. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya.

- b. Menentukan **daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri/kewenangan** Desa/Kelurahan, yang didanai dari Dana Desa (untuk desa), dan DAU kelurahan dan pendampingan APBD-nya (untuk Kelurahan), dengan mendasarkan plafon anggaran pada tahun sebelumnya.
- c. Menetapkan prioritas kegiatan untuk diverifikasi oleh kecamatan pada Musrenbang Kecamatan melalui aplikasi SIPD.

Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa terdiri atas: **3 (tiga) usulan kegiatan prioritas per Desa** yang telah diinput ke aplikasi SIPD tahun 2027.

Hasil Kesepakatan Musrenbang Kelurahan terdiri atas: semua usulan kegiatan yang nantinya akan didanai dari **DAU Kelurahan** dan **Pendamping DAU Kelurahan**. Input Usulan DAU Kel agar ditandai dengan tulisan “ (DAU Kel/pendamping)”.

Input **usulan** tahun 2027 ke SIPD harus **dilengkapi** dengan :

- a. Surat proposal kegiatan yang ditujukan ke Bupati. **Proposal dibuat melalui e-proposal yang disusun sebelumnya oleh pengusul (DPRD atau Kepala Desa/Kelurahan);**
- b. Foto yang dilengkapi dengan koordinat lokasi.

Format manual Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Musrenbang Desa/Kel untuk pengisian ke Aplikasi SIPD sebagai berikut.

Tabel 1
 Daftar Usulan Kegiatan Tahun 2027 melalui Musrenbang Desa/Kelurahan Tahun 2026

No	Permasalahan	Usulan (sesuai Kamus Usulan)	Volume	Titik Koordinat	Alamat (RT, Dukuh/kampung)	Desa/ Kel.	Kec.	Ket (kepemilikan aset)
1	2	3	4	5	... 6	7	8	9
					...			
					...			
					...			

.....
 Kepala Desa/Kelurahan
 Ttd.
 Nama

Catatan:

- 1. Kolom 3 diisi sesuai kamus usulan terlampir.
- 2. Proposal dan foto lokasi usulan kegiatan untuk di upload ke aplikasi SIPD.

B. PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN

Musrenbang RKPD Tahun 2027 di Kecamatan diselenggarakan oleh Camat dan dikoordinasikan oleh Bapperida.

- 1. **Tujuan** penyelenggaraan musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah **untuk melakukan verifikasi atas usulan prioritas** dari desa/kelurahan, dan **DAU Kelurahan dan Pendampingnya (khusus untuk kelurahan)** yang akan

- ditindaklanjuti ke PD Kabupaten terkait, melalui aplikasi SIPD Kemendagri dengan alamat website <https://sipd-ri.kemendagri.go.id>.
2. **Peserta.** Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang kecamatan terdiri dari: kepala desa/kelurahan, anggota DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, keterwakilan perempuan dan anak, kelompok masyarakat rentan termarginalkan serta keterwakilan parpol.
 3. **Persiapan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan**
 - a. Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang oleh Camat
Anggota Tim terdiri dari: unsur kecamatan dan unsur masyarakat (akademisi, tokoh masyarakat, LSM, forum anak dan keterwakilan perempuan) dengan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat dalam seluruh tahap penyelenggaraan musrenbang kecamatan.
 - b. Penyusunan jadwal dan agenda musrenbang Kecamatan.
 - c. Penyiapan bahan/**materi diambil dari SIPD hasil verifikasi Mitra Bappeda** untuk dilakukan pembahasan di Musrenbang Kecamatan oleh kecamatan.
 4. **Untuk tahun 2026, Bapperida tidak melakukan monitoring musrenbang Kecamatan secara tatap muka**, namun tetap memantau usulan prioritas melalui aplikasi SIPD.
 5. **Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2027 di Kecamatan**
 - a. Camat memimpin peserta Musrenbang Kecamatan untuk **menetapkan urutan usulan prioritas perdesa dan Kelurahan (DAU Kelurahan dan pendampingnya)** dari hasil Musrenbang desa/kelurahan yang telah masuk di aplikasi SIPD.
 - b. Camat melakukan **Verifikasi usulan kegiatan prioritas Desa/Kelurahan** melalui aplikasi SIPD dengan alamat website <https://sipd-ri.kemendagri.go.id> oleh admin kecamatan, setelah diperoleh kesepakatan urutan prioritas masing-masing desa/kelurahan.
Untuk Kelurahan, semua usulan yang nantinya akan didanai dari **DAU Kelurahan dan Pendamping DAU Kelurahan agar diverifikasi seluruhnya.**
 - c. Rangkuman hasil kesepakatan, dirumuskan ke dalam **rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan** oleh tim perumus yang dipimpin oleh Camat;
 - d. Rancangan **berita acara kesepakatan** hasil musrenbang kecamatan disepakati dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri kecamatan.
Format Berita Acara sebagai berikut.

RANCANGAN BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2027
DI KECAMATAN

Pada hari..... tanggal..... bulan tahun bertempat di telah diselenggarakan musrenbang RKPD Kabupaten di tingkat Kecamatan yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan:

Usulan-usulan prioritas rencana kegiatan tahun 2027 dari semua desa dan atau kelurahan.

maka pada:

Hari dan Tanggal :
J a m :
Tempat :
Musrenbang Kecamatan :

MENYEPAKATI

Hasil Musrenbang Kecamatan tahun 2026 dalam rangka pelaksanaan mekanisme penyusunan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2027 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana LAMPIRAN II berita acara ini

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Camat
Ttd
(Nama)

Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan:

LAMPIRAN I : Berita Acara Kesepakatan
Musrenbang Kecamatan
Nomor :
Tanggal :

Daftar hadir peserta Musrenbang Kecamatan

NO	Nama	Lembaga/instansi	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
	Dst		

....., Pebruari 2026
Camat

Ttd
(Nama)

- e. **Camat menyampaikan salinan** berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan kepada Bupati c.q. Bapperida, sebagai dokumentasi proses perencanaan tahunan daerah, lengkap dengan **daftar prioritas hasil Musrenbang kecamatan, SK Pembentukan Panitia, Undangan Musrenbangkec, Jadwal Musrenbang desa/Kelurahan, Daftar hadir.**
- f. **Dokumen** dikirim melalui **Surat maya** dalam bentuk **file PDF paling lambat 3 hari setelah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.**

C. **USULAN ASPIRASI DPRD (POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD)**

- 1. Usulan aspirasi DPRD berupa Pokok-pokok Pikiran DPRD disampaikan melalui input oleh semua anggota DPRD ke aplikasi SIPD dengan akun masing-masing. Proses input dilaksanakan **M2 Januari 2026 sampai dengan M3 Februari 2026** atau menjelang pelaksanaan Forum Gabungan PD Kabupaten;
- 2. Usulan aspirasi DPRD harus mempedomani kamus SIPD 2027 dan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PD teknis terkait dan Pemerintah desa terkait nama kelompok calon penerima manfaat, lokasi, dan lain-lain;
- 3. Untuk memudahkan proses input dan verikasi selanjutnya, berikut format usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD dimaksud.

Tabel 2
Daftar Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kab. Sragen Tahun 2027
Nama Anggota DPRD:
Dapil:
Fraksi:

N o	Permasala han	Usulan (sesuai Kamus Usulan)	Volu me	satuan	Alamat (RT, Dukuh/kampung) & nama kelompok	desa	Kec.	Ket (kepemi likan asset)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					T			
					e			

Tempat, Tanggal dan Pengesahan

Catatan:

- 1. Tabel 3 diisi sesuai kamus usulan Terlampir.
- 2. File proposal dan foto lokasi usulan kegiatan, WAJIB di upload ke aplikasi SIPD.
- 3. **Proposal dibuat melalaui e-proposal yang disusun sebelumnya oleh pengusul (DPRD atau Kepala Desa/Kelurahan);**

D. **FORUM PD/GABUNGAN PD KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026**

1. **Pengertian**

- a. Forum PD
merupakan media antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan PD sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan PD dan *stakeholder* terkait.
- b. Forum Gabungan PD
Merupakan forum gabungan PD termasuk Kecamatan membahas terhadap hasil verifikasi usulan prioritas hasil Musrenbang Kecamatan dan pokok-pokok pikiran DPRD dengan PD terkait dengan difasilitasi Bapperida;
Hasil desk baik Forum PD dan Forum Gabungan PD tersebut sebagai bahan untuk menyempurnakan Ranwal Renja PD Kabupaten.

2. **Tujuan** Forum PD/ Forum Gabungan PD Kabupaten adalah:

- a. Menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan PD kabupaten dalam Rancangan Awal PD dengan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan dan aspirasi DPRD;

- b. Mempertajam indikator serta target program, kegiatan dan sub kegiatan PD Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi PD;
- c. Menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan antar PD Kabupaten dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah;
- d. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD kabupaten.

3. Pelaksanaan:

Pelaksanaan Forum PD/Gabungan PD kabupaten direncanakan pada **M3 Februari 2026**

Penyelenggaraan Forum PD/ Forum Gabungan PD kabupaten terhadap hasil verifikasi usulan prioritas hasil Musrenbang Kecamatan dan pokok-pokok pikiran DPRD dengan PD terkait diselenggarakan di bawah koordinasi Bapperida.

4. Unsur-unsur Forum PD/Gabungan PD

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam Forum PD/ forum gabungan PD adalah:

- a. Peserta
Peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten antara lain terdiri dari unsur Bapperida, PD Kabupaten dan unsur lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.
- b. Narasumber dan Fasilitator
Narasumber forum PD/Lintas PD Kabupaten berasal dari Bapperida, PD Kabupaten (BPKPD), dan atau unsur lain sesuai dengan kebutuhan.

5. Mekanisme:

- a. Tahap Persiapan Forum PD/Gabungan PD
 - 1) Penyiapan Tim Penyelenggara Forum PD/Forum Gabungan PD Kabupaten;
 - 2) Penyiapan tata cara penyelenggaraan yang memuat antara lain jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan forum PD dan pembagian kelompok dan tata tertib acara;
 - 3) Menyiapkan bahan untuk pembahasan antara lain rancangan Renja PD kabupaten, inventarisasi kertas kerja proses penyusunan rancangan Renja PD sebagai sumber data dan informasi bagi peserta forum apabila memerlukan klarifikasi atas rancangan Renja PD kabupaten yang akan dibahas;
 - 4) Melaporkan rencana pelaksanaan forum PD Kabupaten kepada Bupati.
- b. Tahap Penyelenggaraan Forum PD/Forum Gabungan PD
Forum PD/Forum Gabungan PD dilaksanakan dengan Sidang Kelompok melalui Desk Verifikasi usulan prioritas hasil Musrenbang kecamatan dengan PD terkait sesuai kelompoknya masing-masing di bawah koordinasi Bidang teknis Bapperida terkait.
Hasil Desk Forum PD/Forum Gabungan PD merupakan:

- 1) bahan pertimbangan PD terkait untuk melakukan verifikasi usulan hasil musrenbang kecamatan dan pokok-pokok pikiran DPRD melalui aplikasi SIPD.
- 2) bahan untuk penyempurnaan Ranwal Renja PD Kabupaten terkait.

Rangkuman keputusan hasil sidang kelompok dirumuskan ke dalam **berita acara** kesepakatan hasil forum PD/ forum gabungan PD kabupaten oleh tim perumus.

E. MUSRENBANG KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026

1. Musrenbang Kabupaten Sragen tahun 2026 merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas Rancangan RKPD Kabupaten Tahun 2027 berdasarkan Rancangan Renja PD hasil Forum PD/Gabungan PD.

2. **Unsur-unsur** yang dilibatkan dalam musrenbang Kabupaten Sragen tahun 2026.

a. Peserta

Musrenbang Kabupaten diikuti oleh Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten dan DPRD Provinsi sesuai daerah pemilihannya, unsur pemerintah pusat, unsur pemerintah provinsi, Kepala PD kabupaten, camat, keterwakilan peserta musrenbang kecamatan, perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengkajian, Tim Penggerak PKK, LSM, Orsos, organisasi agama, organisasi wanita, tokoh masyarakat, unsur dunia usaha/investor, BUMN/BUMD/Perusda, keterwakilan perempuan, anak dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan, keterwakilan parpol serta kabupaten/kota yang berbatasan.

b. Narasumber

Pejabat Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan DPRD kabupaten, dan pejabat Perangkat Daerah kabupaten atau dari unsur lain yang dipandang perlu, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD Kabupaten.

4. Mekanisme Penyelenggaraan Musrenbang

a. Tahap Persiapan

- 1) Penyiapan Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten;
- 2) Penyiapan tata cara penyelenggaraan yang memuat antara lain jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten dan pembagian kelompok dan tata tertib acara;
- 3) Menyiapkan dokumen Rancangan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2027 sebagai materi pokok yang akan dimusyawarahkan;

b. Tahap Penyelenggaraan

- 1) Pembukaan dan Sambutan;
- 2) Pemaparan materi dari para narasumber (Provinsi dan Daerah);
- 3) Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD;
- 4) Kesepakatan hasil Musrenbang Kabupaten;
- 5) Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Kabupaten.

5. Waktu Pelaksanaan

Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten direncanakan pada **M2 Maret 2026**.

III. PENUTUP

Tata cara Penyelenggaraan Musrenbang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2026 ini menjadi pedoman pelaksanaan guna memperlancar pelaksanaan pada setiap tahapan proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2027 serta mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

Sragen, 4 Desember 2025



TIMELINE PERENCANAAN TAHUN 2027

Sragen Berkelanjutan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Ditopang SDM Unggul, Tata Kelola Dinamis dan Pembangunan Yang Terintegrasi



KAMUS USULAN SIPD 2027
USULAN MASYARAKAT DAN POKIR DPRD KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2027

Prioritas	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2027	TEMATIK	KODE	SUB KEGIATAN	USULAN LENGKAP	CONTOH URAIAN PERMASALAHAN	SATUAN	ESTIMASI BIAYA	SYARAT DAN KETENTUAN	KET	OPD
PD1. Peningkatan Perencanaan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	PROGRAM PEMBANGUNAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	12,50		2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	1.a Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan bantuan alat kerja Bagi UMKM KONVEKSI	PELATIHAN MANAJEMEN USAHA (BANLAT MESIN JAHIT HIGHSPEED)	Paket	Rp 5.500.000	1. Peserta merupakan Usaha Mikro di bidang konveksi 2. Peserta bersedia memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan, antara lain menyerahkan fotocopy KTP, dan fotocopy rekening Bank Umum (selain BPR/BKK), dan mengisi profil usaha, 3. Peserta bersedia mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan selama kurang lebih 3 (tiga) hari. 4. Peserta bersedia menerima Bantuan alat usaha sebagaimana yang telah diusulkan, menandatangani Berita Acara Penerimaan Alat dan memanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan usaha yang dijalankan. 5. Penerima Alat Usaha adalah Peserta kegiatan Perorangan, bukan Kelompok	1. Estimasi biaya per Paket merupakan estimasi per satu peserta, yang meliputi Bimbingan teknis selama 3 hari dan bantuan Alat sesuai Paket (Bimtek +-Rp 1.000.000, - Banlat Rp 4.600.000) 2. Paket Bimtek sudah termasuk biaya Sewa Tempat, narasumber, makan dan minum, alat tulis serta transport peserta, dengan jumlah peserta minimal 25 Orang per kelas 3. Alat Usaha yang diberikan adalah alat usaha utama yang benar benar dibutuhkan dalam kegiatan usaha 4. Bantuan Alat usaha yang diberikan kepada masing masing peserta tidak harus sama antara peserta satu dengan lainnya tetapi disesuaikan dengan prioritas kebutuhan dan nilai paket perorangan yang dialokasikan	Diskumindag
					2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	1.b Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan bantuan alat kerja Bagi UMKM KONVEKSI	PELATIHAN MANAJEMEN USAHA (BANLAT MESIN OBRAS BENANG 5)	Paket	Rp 7.000.000	1. Peserta merupakan Usaha Mikro di bidang konveksi 2. Peserta bersedia memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan, antara lain menyerahkan fotocopy KTP, dan fotocopy rekening Bank Umum (selain BPR/BKK), dan mengisi profil usaha, 3. Peserta bersedia mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan selama kurang lebih 3 (tiga) hari. 4. Peserta bersedia menerima Bantuan alat usaha sebagaimana yang telah diusulkan, menandatangani Berita Acara Penerimaan Alat dan memanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan usaha yang dijalankan. 5. Penerima Alat Usaha adalah Peserta kegiatan Perorangan, bukan Kelompok	1. Estimasi biaya per Paket merupakan estimasi per satu peserta, yang meliputi Bimbingan teknis selama 3 hari dan bantuan Alat sesuai Paket (Bimtek +- Rp 1.000.000, - Banlat Rp 6.100.000) 2. Paket Bimtek sudah termasuk biaya Sewa Tempat, narasumber, makan dan minum, alat tulis serta transport peserta, dengan jumlah peserta minimal 25 Orang per kelas 3. Alat Usaha yang diberikan adalah alat usaha utama yang benar benar dibutuhkan dalam kegiatan usaha 4. Bantuan Alat usaha yang diberikan kepada masing masing peserta tidak harus sama antara peserta satu dengan lainnya tetapi disesuaikan dengan prioritas kebutuhan dan nilai paket perorangan yang dialokasikan	Diskumindag

Prioritas	PROGR AM	INDIKAT OR	TARGET 2027	TEMATIK	KODE	SUB KEGIATAN	USULAN LENGKAP	CONTOH URAIAN PERMASALAHAN	SATUAN	ESTIMASI BIAYA	SYARAT DAN KETENTUAN	KET	OPD
					2.17.07. 2.01.001 5	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	1. b Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan bantuan alat kerja Bagi UMKM PERCETAKAN OFFSET	PELATIHAN MANAJEMEN USAHA (BANLAT Mesin Printer Kertas)	Paket	Rp 4.500.000	1. Peserta merupakan Usaha Mikro di bidang percetakan 2. Peserta bersedia memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan, antara lain menyerahkan fc KTP, dan fc rekening Bank Umum (selain BPR/BKK), dan mengisi profil usaha, 3. Peserta bersedia mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan selama kurang lebih 3 (tiga) hari. 4. Peserta bersedia menerima Bantuan alat usaha sebagaimana yang telah diusulkan, menandatangani Berita Acara Penerimaan Alat dan memanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan usaha yang dijalankan. 5. Penerima Alat Usaha adalah Peserta kegiatan Perorangan, bukan Kelompok	1. Estimasi biaya per Paket merupakan estimasi per satu peserta, yang meliputi Bimbingan teknis selama 3 hari dan bantuan Alat sesuai Paket (Bimtek +- Rp 1.000.000, - Banlat Rp 3.500.000) 2. Paket Bimtek sudah termasuk biaya Sewa Tempat, narasumber, makan dan minum, alat tulis serta transport peserta, dengan jumlah peserta minimal 25 Orang per kelas 3. Alat Usaha yang diberikan adalah alat usaha utama yang benar benar dibutuhkan dalam kegiatan usaha 4. Bantuan Alat usaha yang diberikan kepada masing masing peserta tidak harus sama antara peserta satu dengan lainnya tetapi disesuaikan dengan prioritas kebutuhan dan nilai paket perorangan yang dialokasikan	Diskumindag
					2.17.07. 2.01.001 5	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	1. b Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan bantuan alat kerja Bagi UMKM Laundry	PELATIHAN MANAJEMEN USAHA (BANLAT berupa Mesin Cuci dan Setrika)	Paket	Rp 9.250.000	1. Peserta merupakan Usaha Mikro di bidang jasa laundry 2. Peserta bersedia memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan, antara lain menyerahkan fc KTP, dan fc rekening Bank Umum (selain BPR/BKK), dan mengisi profil usaha, 3. Peserta bersedia mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan selama kurang lebih 3 (tiga) hari. 4. Peserta bersedia menerima Bantuan alat usaha sebagaimana yang telah diusulkan, menandatangani Berita Acara Penerimaan Alat dan memanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan usaha yang dijalankan. 5. Penerima Alat Usaha adalah Peserta kegiatan Perorangan, bukan Kelompok	1. Estimasi biaya per Paket merupakan estimasi per satu peserta, yang meliputi Bimbingan teknis selama 3 hari dan bantuan Alat sesuai Paket (Bimtek +- Rp 1.000.000, - Banlat Rp 8.250.000) 2. Paket Bimtek sudah termasuk biaya Sewa Tempat, narasumber, makan dan minum, alat tulis serta transport peserta, dengan jumlah peserta minimal 25 Orang per kelas 3. Alat Usaha yang diberikan adalah alat usaha utama yang benar benar dibutuhkan dalam kegiatan usaha 4. Bantuan Alat usaha yang diberikan kepada masing masing peserta tidak harus sama antara peserta satu dengan lainnya tetapi disesuaikan dengan prioritas kebutuhan dan nilai paket perorangan yang dialokasikan	Diskumindag

Prioritas	PROGR AM	INDIKAT OR	TARGET 2027	TEMATIK	KODE	SUB KEGIATAN	USULAN LENGKAP	CONTOH URAIAN PERMASALAHAN	SATUAN	ESTIMASI BIAYA	SYARAT DAN KETENTUAN	KET	OPD
					2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	2.a Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan bantuan alat kerja Bagi UMKM MAKANAN / MINUMAN OLAHAN	PELATIHAN MANAJEMEN USAHA (Banlat Mixer, Oven sedang dan Kompor Gas 2 Tungku)	Paket	Rp 5.500.000	1. Peserta merupakan Usaha Mikro di bidang Pengolahan MAKANAN 2. Peserta bersedia memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan, antara lain menyerahkan fe KTP, dan fe rekening Bank Umum (selain BPR/BKK), dan mengisi profil usaha, 3. Peserta bersedia mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan selama kurang lebih 3 (tiga) hari. 4. Peserta bersedia menerima Bantuan alat usaha sebagaimana yang telah diusulkan, menandatangani Berita Acara Penerimaan Alat dan memanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan usaha yang dijalankan. 5. Penerima Alat Usaha adalah Peserta kegiatan Perorangan, bukan Kelompok	1. Estimasi biaya per Paket merupakan estimasi per satu peserta, yang meliputi Bimbingan teknis selama 3 hari dan banlat per jenis barang (Bimtek +- Rp 1.000.000, - Banlat Rp. 4.500.000) 2. Paket Bimtek sudah termasuk biaya narasumber, makan dan minum, alat tulis serta transport peserta, dengan jumlah peserta minimal 25 Orang 3. Alat Usaha yang diberikan adalah alat usaha utama yang benar benar dibutuhkan dalam kegiatan usaha 4. Bantuan Alat usaha yang diberikan kepada masing masing peserta tidak harus sama antara peserta satu dengan lainnya tetapi disesuaikan dengan prioritas kebutuhan dan nilai paket perorangan yang dialokasikan	Diskumindag
					2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	2.b Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan bantuan alat kerja Bagi UMKM MAKANAN / MINUMAN OLAHAN	PAKET PELATIHAN MANAJEMEN USAHA (Banlat Freezer Box)	Paket	Rp 6.000.000	1. Peserta merupakan Usaha Mikro di bidang Pengolahan MAKANAN 2. Peserta bersedia memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan, antara lain menyerahkan fe KTP, dan fe rekening Bank Umum (selain BPR/BKK), dan mengisi profil usaha, 3. Peserta bersedia mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan selama kurang lebih 3 (tiga) hari. 4. Peserta bersedia menerima Bantuan alat usaha sebagaimana yang telah diusulkan, menandatangani Berita Acara Penerimaan Alat dan memanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan usaha yang dijalankan. 5. Penerima Alat Usaha adalah Peserta kegiatan Perorangan, bukan Kelompok	1. Estimasi biaya per Paket merupakan estimasi per satu peserta, yang meliputi Bimbingan teknis selama 3 hari dan banlat per jenis barang (Bimtek +- Rp 1.000.000, - Banlat Rp 5.000.000) 2. Paket Bimtek sudah termasuk biaya narasumber, makan dan minum, alat tulis serta transport peserta, dengan jumlah peserta minimal 25 Orang 3. Alat Usaha yang diberikan adalah alat usaha utama yang benar benar dibutuhkan dalam kegiatan usaha 4. Bantuan Alat usaha yang diberikan kepada masing masing peserta tidak harus sama antara peserta satu dengan lainnya tetapi disesuaikan dengan prioritas kebutuhan dan nilai paket perorangan yang dialokasikan	Diskumindag

Prioritas	PROGR AM	INDIKAT OR	TARGET 2027	TEMATIK	KODE	SUB KEGIATAN	USULAN LENGKAP	CONTOH URAIAN PERMASALAHAN	SATUAN	ESTIMASI BIAYA	SYARAT DAN KETENTUAN	KET	OPD
					2.17.07. 2.01.001 5	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	2.e Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan bantuan alat kerja Bagi UMKM MAKANAN / MINUMAN OLAHAN	PELATIHAN MANAJEMEN USAHA (Banlat cup sealer, blender, dispenser, cooler box):	Paket	Rp 5.000.000	1. Peserta merupakan Usaha Mikro di bidang Pengolahan MINUMAN 2. Peserta bersedia memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan, antara lain menyerahkan fc KTP, dan fc rekening Bank Umum (selain BPR/BKK), dan mengisi profil usaha, 3. Peserta bersedia mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan selama kurang lebih 3 (tiga) hari. 4. Peserta bersedia menerima Bantuan alat usaha sebagaimana yang telah diusulkan, menandatangani Berita Acara Penerimaan Alat dan memanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan usaha yang dijalankan. 5. Penerima Alat Usaha adalah Peserta kegiatan Perorangan, bukan Kelompok	1. Estimasi biaya per Paket merupakan estimasi per satu peserta, yang meliputi Bimbingan teknis selama 3 hari dan banlat per jenis barang (- Bimtek +- Rp 1.000.000, - Banlat Rp. 4.000.000 2. Paket Bimtek sudah termasuk biaya narasumber, makan dan minum, alat tulis serta transport peserta, dengan jumlah peserta minimal 25 Orang 3. Alat Usaha yang diberikan adalah alat usaha utama yang benar benar dibutuhkan dalam kegiatan usaha 4. Bantuan Alat usaha yang diberikan kepada masing masing peserta tidak harus sama antara peserta satu dengan lainnya tetapi disesuaikan dengan prioritas kebutuhan dan nilai paket perorangan yang dialokasikan	Diskumindag
					2.17.07. 2.01.001 5	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	2.f Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan bantuan alat kerja Bagi UMKM MAKANAN / MINUMAN OLAHAN	PELATIHAN MANAJEMEN USAHA (Banlat kuilkas)	Paket	Rp 6.000.000	1. Peserta merupakan Usaha Mikro di bidang Pengolahan MINUMAN 2. Peserta bersedia memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan, antara lain menyerahkan fc KTP, dan fc rekening Bank Umum (selain BPR/BKK), dan mengisi profil usaha, 3. Peserta bersedia mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan selama kurang lebih 3 (tiga) hari. 4. Peserta bersedia menerima Bantuan alat usaha sebagaimana yang telah diusulkan, menandatangani Berita Acara Penerimaan Alat dan memanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan usaha yang dijalankan. 5. Penerima Alat Usaha adalah Peserta kegiatan Perorangan, bukan Kelompok	1. Estimasi biaya per Paket merupakan estimasi per satu peserta, yang meliputi Bimbingan teknis selama 3 hari dan banlat per jenis barang (- Bimtek +- Rp 1.000.000, - Banlat Rp 5.000.000.) 2. Paket Bimtek sudah termasuk biaya narasumber, makan dan minum, alat tulis serta transport peserta, dengan jumlah peserta minimal 25 Orang 3. Alat Usaha yang diberikan adalah alat usaha utama yang benar benar dibutuhkan dalam kegiatan usaha 4. Bantuan Alat usaha yang diberikan kepada masing masing peserta tidak harus sama antara peserta satu dengan lainnya tetapi disesuaikan dengan prioritas kebutuhan dan nilai paket perorangan yang dialokasikan	Diskumindag

Prioritas	PROGR AM	INDIKAT OR	TARGET 2027	TEMATIK	KODE	SUB KEGIATAN	USULAN LENGKAP	CONTOH URAIAN PERMASALAHAN	SATUAN	ESTIMASI BIAYA	SYARAT DAN KETENTUAN	KET	OPD
					2.17.07. 2.01.001 5	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	3.a Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan bantuan alat kerja Bagi UMKM MEBEL DAN HANDICRAFT	PAKET PELATIHAN MANAJEMEN USAHA (Banlat Mesin Pasah Listrik Kecil, Mesin Propil, Mesin Boor Tangan)	Paket	Rp 8.000.000	1. Peserta merupakan Usaha Mikro di bidang Mebel dan Handicraf berbahan kayu/bambu. 2. Peserta bersedia memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan, antara lain menyerahkan fotocopy KTP, dan fotocopy rekening Bank Umum (selain BPR/BKK), dan mengisi profil usaha, 3. Peserta bersedia mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan selama kurang lebih 3 (tiga) hari. 4. Peserta bersedia menerima Bantuan alat usaha sebagaimana yang telah diusulkan, menandatangani Berita Acara Penerimaan Alat dan memanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan usaha yang dijalankan. 5. Penerima Alat Usaha adalah Peserta kegiatan Perorangan, bukan Kelompok	1. Estimasi biaya per Paket merupakan estimasi per satu peserta, yang meliputi Bimbingan teknis selama 3 hari dan banlat per jenis barang (Bimtek +/- Rp 1.000.000, Banlat Rp. 7.000.000 2. Paket Bimtek sudah termasuk biaya narasumber, makan dan minum, alat tulis serta transport peserta, dengan jumlah peserta minimal 25 Orang 3. Alat Usaha yang diberikan adalah alat usaha utama yang benar benar dibutuhkan dalam kegiatan usaha 4. Bantuan Alat usaha yang diberikan kepada masing masing peserta tidak harus sama antara peserta satu dengan lainnya tetapi disesuaikan dengan prioritas kebutuhan dan nilai paket perorangan yang dialokasikan	Diskumindag
					2.17.07. 2.01.001 5	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	3.b Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan bantuan alat kerja Bagi UMKM MEBEL DAN HANDICRAFT	PELATIHAN MANAJEMEN USAHA (Banlat Boor Duduk, Tatah Bobog)	Paket	Rp 7.500.000	1. Peserta merupakan Usaha Mikro di bidang Mebel dan Handicraf berbahan kayu/bambu. 2. Peserta bersedia memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan, antara lain menyerahkan fotocopy KTP, dan fotocopy rekening Bank Umum (selain BPR/BKK), dan mengisi profil usaha, 3. Peserta bersedia mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan selama kurang lebih 3 (tiga) hari. 4. Peserta bersedia menerima Bantuan alat usaha sebagaimana yang telah diusulkan, menandatangani Berita Acara Penerimaan Alat dan memanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan usaha yang dijalankan. 5. Penerima Alat Usaha adalah Peserta kegiatan Perorangan, bukan Kelompok	1. Estimasi biaya per Paket merupakan estimasi per satu peserta, yang meliputi Bimbingan teknis selama 3 hari dan banlat per jenis barang (Bimtek Rp +/- 1.000.000, Banlat Rp. 6.500.000 2. Paket Bimtek sudah termasuk biaya narasumber, makan dan minum, alat tulis serta transport peserta, dengan jumlah peserta minimal 25 Orang 3. Alat Usaha yang diberikan adalah alat usaha utama yang benar benar dibutuhkan dalam kegiatan usaha 4. Bantuan Alat usaha yang diberikan kepada masing masing peserta tidak harus sama antara peserta satu dengan lainnya tetapi disesuaikan dengan prioritas kebutuhan dan nilai paket perorangan yang dialokasikan	Diskumindag

Prioritas	PROGR AM	INDIKAT OR	TARGET 2027	TEMATIK	KODE	SUB KEGIATAN	USULAN LENGKAP	CONTOH URAIAN PERMASALAHAN	SATUAN	ESTIMASI BIAYA	SYARAT DAN KETENTUAN	KET	OPD
					2.17.07. 2.01.001 5	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	3.c Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan bantuan alat kerja Bagi UMKM MEABEL DAN HANDICRAFT	PELATIHAN MANAJEMEN USAHA (Banlat Compressor)		Rp 7.250.000	1. Peserta merupakan Usaha Mikro di bidang Mebel dan Handicraf berbahan kayu/bambu. 2. Peserta bersedia memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan, antara lain menyerahkan fc KTP, dan fc rekening Bank Umum (selain BPR/BKK), dan mengisi profil usaha, 3. Peserta bersedia mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan selama kurang lebih 3 (tiga) hari. 4. Peserta bersedia menerima Bantuan alat usaha sebagaimana yang telah diusulkan, menandatangani Berita Acara Penerimaan Alat dan memanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan usaha yang dijalankan. 5. Penerima Alat Usaha adalah Peserta kegiatan Perorangan, bukan Kelompok	1. Estimasi biaya per Paket merupakan estimasi per satu peserta, yang meliputi Bimbingan teknis selama 3 hari dan banlat per jenis barang (Bimtek Rp +- 1.000.000, Banlat Rp 6.250.000 2. Paket Bimtek sudah termasuk biaya narasumber, makan dan minum, alat tulis serta transport peserta, dengan jumlah peserta minimal 25 Orang 3. Alat Usaha yang diberikan adalah alat usaha utama yang benar benar dibutuhkan dalam kegiatan usaha 4. Bantuan Alat usaha yang diberikan kepada masing masing peserta tidak harus sama antara peserta satu dengan lainnya	Diskumindag
					2.17.07. 2.01.001 5	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	4.a Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan bantuan alat kerja Bagi UMKM PERDAGANGAN	PELATIHAN MANAJEMEN USAHA PERDAGANGAN (Banlat Gerobak dan Meja Kursi)	Paket	Rp 8.500.000	1. Peserta merupakan Usaha Mikro di bidang PERDAGANGAN 2. Peserta bersedia memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan, antara lain menyerahkan fc KTP, dan fc rekening Bank Umum (selain BPR/BKK), dan mengisi profil usaha, 3. Peserta bersedia mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan selama kurang lebih 3 (tiga) hari. 4. Peserta bersedia menerima Bantuan alat usaha sebagaimana yang telah diusulkan, menandatangani Berita Acara Penerimaan Alat dan memanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan usaha yang dijalankan. 5. Penerima Alat Usaha adalah Peserta kegiatan Perorangan, bukan Kelompok	1. Estimasi biaya per Paket merupakan estimasi per satu peserta, yang meliputi Bimbingan teknis selama 3 hari dan banlat per jenis barang (Bimtek +- Rp 1.000.000, banlat 7.500.000 2. Paket Bimtek sudah termasuk biaya narasumber, makan dan minum, alat tulis serta transport peserta, dengan jumlah peserta minimal 25 Orang 3. Alat Usaha yang diberikan adalah alat usaha utama yang benar benar dibutuhkan dalam kegiatan usaha 4. Bantuan Alat usaha yang diberikan kepada masing masing peserta tidak harus sama antara peserta satu dengan lainnya tetapi disesuaikan dengan prioritas kebutuhan dan nilai paket perorangan yang dialokasikan	Diskumindag

Prioritas	PROGR AM	INDIKAT OR	TARGET 2027	TEMATIK	KODE	SUB KEGIATAN	USULAN LENGKAP	CONTOH URAIAN PERMASALAHAN	SATUAN	ESTIMASI BIAYA	SYARAT DAN KETENTUAN	KET	OPD
					2.17.07. 2.01.001 5	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	4. b Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan bantuan alat kerja Bagi UMKM PERDAGANGAN	PELATIHAN PERDAGANGAN (BANLAT Etalase Kaca)		Rp 3.500.000	1. Peserta merupakan Usaha Mikro di bidang PERDAGANGAN 2. Peserta bersedia memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan, antara lain menyerahkan f. KTP, dan f. rekening Bank Umum (selain BPR/BKK), dan mengisi profil usaha, 3. Peserta bersedia mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan selama kurang lebih 3 (tiga) hari. 4. Peserta bersedia menerima Bantuan alat usaha sebagaimana yang telah diusulkan, menandatangani Berita Acara Penerimaan Alat dan memanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan usaha yang dijalankan. 5. Penerima Alat Usaha adalah Peserta kegiatan Perorangan, bukan Kelompok	1. Estimasi biaya per Paket merupakan estimasi per satu peserta, yang meliputi Bimbingan teknis selama 3 hari dan banlat per jenis barang (Bimtek +- Rp 1.000.000, Banlat Rp. 2.500.000 2. Paket Bimtek sudah termasuk biaya narasumber, makan dan minum, alat tulis serta transport peserta, dengan jumlah peserta minimal 25 Orang 3. Alat Usaha yang diberikan adalah alat usaha utama yang benar benar dibutuhkan dalam kegiatan usaha 4. Bantuan Alat usaha yang diberikan kepada masing masing peserta tidak harus sama antara peserta satu dengan lainnya tetapi disesuaikan dengan prioritas kebutuhan dan nilai paket perorangan yang dialokasikan	Diskumindag
	Program Pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	91,23		2.17.05. 2.01.000 1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Diklat Bagi Pengawas Koperasi	Meningkatkan Kompetensi, profesionalitas, dan kualitas pengelolaan koperasi secara keseluruhan	paket	Rp 51.000.000	1. Peserta Merupakan Pengawas koperasi yang aktif (dibuktikan dengan berita acara pemilihan Pengawas). 2. Peserta bersedia memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan antara lain menyerahkan f. KTP, dan f. Rekening Bank Umum (Selain BPR/BKK). 3. Peserta bersedia mengikuti kegiatan	Estimasi Biaya Merupakan Biaya Diklat Selama 3 hari untuk 25 Peserta, biaya Narasumber, Makan dan Minum, alat tulis serta transport peserta minimal 25 Orang peserta	Diskumindag
	PROGRA M PENGE MBANG AN SUMBE R DAYA PARIWIS ATA DAN EKONO MI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	19,00		2.19.02. 2.01.001 5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Event kegiatan Kepemudaan	kegiatan Kepemudaan	paket	Rp 50.000.000	Kriteria calon peserta : 1.Organisasi pemuda , 2. Jumlah peserta / menyesuaikan 3. Tidak diperuntukan untuk studi banding		Dispora
					3.26.05. 2.02.000 1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Pelatihan pelaku Ekonomi kreatif	Meningkatkan kapasitas SDM pelaku ekonomi kreatif	paket	Rp 50.000.000	Kriteria calon peserta : 1.Pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Sragen 2. Diperuntukan Pelatihan Digital marketing untuk pemasaran Ekraf 3. Tidak diperuntukan untuk studi banding		Dispora
						Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten /kota	Pelatihan desa wisata	Meningkatkan kapasitas SDM pelaku wisata	paket	Rp 50.000.000	Kriteria calon peserta : 1. Memiliki Lokasi Desa Wisata 2. Jenis pelatihan Pengelolaan Desa Wisata, Kapasitas SDM Desa Wisata. 3. Tidak diperuntukan untuk studi banding	pelatihan digital marketing diganti menjadi pelatihan ekonomi kreatif (cakupan lebih luas dan lebih flexibel)	Dispora

Prioritas	PROGR AM	INDIKAT OR	TARGET 2027	TEMATIK	KODE	SUB KEGIATAN	USULAN LENGKAP	CONTOH URAIAN PERMASALAHAN	SATUAN	ESTIMASI BIAYA	SYARAT DAN KETENTUAN	KET	OPD
					3.26.05. 2.01.000 5	Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	Seni pertunjukan di destinasi Wisata	seni pertunjukan wayang Di destinasi Wisata Kabupaten Sragen		Rp 100.000.000	Kriteria pertunjukan : 1. lokasi pertunjukan di Destinasi Wisata		Dispora
					3.26.04. 2.02.000 5	Pengembangan Sistem Pemasaran	Seni pertunjukan di destinasi Wisata	seni pertunjukan seni (musik,rati dll) Di destinasi Wisata Kabupaten Sragen		Rp 50.000.000	Kriteria pertunjukan : 1. lokasi pertunjukan di Destinasi Wisata	Pertunjukan wayang diganti menjadi seni pertunjukan budaya (wayang, tari dll)	Dispora
					2.19.03. 2.01.000 5	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Pengadaan sarpras olahraga masyarakat	menumbuhkan semangat berolahraga			Kriteria : 1. Harga sarpras di sesuaikan SSH 2. Calon penerima manfaat karangtaruna desa bukan perorangan 3. Usulan dikordinasikan dengan OPD teknis		Dispora
					2.19.03. 2.02.000 6	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Turnamen olahraga	mencari bibit atlet olahraga		Rp 30.000.000	Kriteria : 1. Turnamen bisa voly,sepakbola dll 2. Calon penerima manfaat karangtaruna desa bukan perorangan 3. Usulan dikordinasikan dengan OPD teknis		Dispora
					2.19.03. 2.04.000 6	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Hibah	kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		sesuai kemampuan daerah	Kriteria : 1. sudah berbdan hukum 2. bantuan tidak berturut-turut kecuali yng diperbolehkan dalam perundangan 3. dll		Dispora
	PROGRA M PENYED IAAN DAN PENGE MBANG AN SARANA PERTANI AN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	0,26		3.27.02. 2.02.003	Pemanfaatan Hewan/ Tanaman SDG	1 Bantuan Benih Padi	Penggunaan benih padi belum berkualitas sehingga provitas rendah	paket	Rp 50.000.000	Syarat dan Ketentuan: 1. Kelompoktani sudah terdaftar di SK Bupati 2. Belum menerima bantuan benih padi dari APBD II satu tahun kemarin 3. Bantuan berupa hibah barang benih berkualitas 4. Paket bantuan sudah termasuk biaya operasional	1. Dasar hukum Perbup Hibah Bansos Nomor 60 Tahun 2021 2. Harga satuan benih padi Rp. 15.000,- per kg dan standar kebutuhan benih padi 25 kg per ha, sehingga dapat terbantu luasan 100 Ha	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	84		3.27.02. 2.02.003	Pemanfaatan Hewan/ Tanaman SDG	1 Bantuan Budidaya Buah	Masih rendahnya produksi buah	paket	Rp 50.000.000	Syarat dan Ketentuan: 1. Kelompoktani/ Gapoktan sudah terdaftar di SK Bupati 2. Memiliki lahan demplot kelompok dan atau dapat ditanam dipekarangan 3. Bantuan hibah barang berupa bibit tanaman buah (alpukat, mangga, nangka dll) dan pupuk organik 4. Sudah termasuk biaya oprasinya		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Prioritas	PROGR AM	INDIKAT OR	TARGET 2027	TEMATIK	KODE	SUB KEGIATAN	USULAN LENGKAP	CONTOH URAIAN PERMASALAHAN	SATUAN	ESTIMASI BIAYA	SYARAT DAN KETENTUAN	KET	OPD
		Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	0,01		3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Bantuan ternak kambing	Kambing Jawa Randu betina	paket ternak	Rp 25.000.000	"Kriteria calon penerima : 1. Kelompok sudah terdaftar dalam SK Bupati 2. Kelompok harus sudah berbadan hukum 3. Jumlah anggota minimal 10 orang/kelompok dengan ketentuan 60 % sudah berpengalaman dalam beternak dan 40 % masuk dalam DTKS 4. Jumlah anggota = jumlah ternak yang diusulkan atau kelipatannya 5. Jenis komoditas disebutkan yang jelas (kambing betina atau sapi Betina) 6. Harus menyediakan kandang komunal 7. Sudah termasuk biaya operasinya"	1. Dasar hukum Perbup Hibah Bansos Nomor 60 Tahun 2021 2. Harga satuan Kambing Rp 2.500.000 , satuan Sapi Rp 20.000.000	
							2 Bantuan ternak sapi	Sapi Betina Persilangan Simmental/persilangan Limousin	paket ternak	Rp 200.000.000	"Kriteria calon penerima : 1. Kelompok sudah terdaftar dalam SK Bupati 2. Kelompok harus sudah berbadan hukum 3. Jumlah anggota minimal 10 orang/kelompok dengan ketentuan 50 % sudah berpengalaman dalam beternak dan 40 % masuk dalam DTKS 4. Jumlah anggota = jumlah ternak yang diusulkan atau kelipatannya 5. Jenis komoditas disebutkan yang jelas (kambing betina atau sapi Betina) 6. Harus menyediakan kandang komunal 7. Sudah termasuk biaya operasinya"		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan	100		3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1 Jalan Usaha Tani	Masih Banyak jalan usaha tani yang belum terbangun	Paket	Koordinasi Dinas Pertanian dan menyesuaikan standar belanja daerah	Kriteria calon penerima : 1. Kelompok Tani / Gapoktan Penerima harus terdaftar di SK Bupati 2. Volume Jalan menyesuaikan Anggaran		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
					3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2 jaringan Irigasi usaha tani	Masih banyak jaringan irigasi usaha tani yang belum terbangun	Paket	Koordinasi Dinas Pertanian dan menyesuaikan standar belanja daerah	Kriteria calon penerima : 1. Kelompok Tani / Gapoktan Penerima harus terdaftar di SK Bupati 2. Jaringan irigasi tersier 3. Panjang Jaringan menyesuaikan Anggaran		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Prioritas	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2027	TEMATIK	KODE	SUB KEGIATAN	USULAN LENGKAP	CONTOH URAIAN PERMASALAHAN	SATUAN	ESTIMASI BIAYA	SYARAT DAN KETENTUAN	KET	OPD
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	46.101,70		3.25.04.2.02.0002	02 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	1 Budidaya ikan lele (tanpa Kolam)	Perlu menjaga ketersediaan produksi ikan lele di Kabupaten Sragen bagi kelompok pembudidaya pemula	paket budidaya Lele tanpa Kolam	Rp 45.000.000	Kriteria calon penerima : 1. calon Kelompok penerima hibah sudah ber Badan Hukum dan telah terdaftar dalam Surat Keputusan Bupati 2. Masih aktif kepengurusannya 3. Surat keterangan domisili dari lurah/ kepala desa setempat; 4. Memiliki sumber daya air yang memadai untuk kegiatan budidaya ikan; 5. memiliki lahan untuk kegiatan budidaya ikan secara berkelanjutan 6. bantuan hibah barang berupa (benih lele, pakan ikan) 7. Sudah termasuk biaya operasinya		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
							2 Budidaya ikan lele (dengan Kolam)	Perlu menjaga ketersediaan produksi ikan lele di Kabupaten Sragen bagi kelompok pembudidaya pemula	paket budidaya Lele dengan Kolam	Rp 60.000.000	Kriteria calon penerima : 1. calon Kelompok penerima hibah sudah ber Badan Hukum dan telah terdaftar dalam Surat Keputusan Bupati 2. Masih aktif kepengurusannya 3. Surat keterangan domisili dari lurah/ kepala desa setempat; 4. Memiliki sumber daya air yang memadai untuk kegiatan budidaya ikan; 5. memiliki lahan untuk kegiatan budidaya ikan secara berkelanjutan 6. bantuan hibah barang berupa (kolam, benih lele, pakan ikan) 7. Sudah termasuk biaya operasinya		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
							3 Budidaya Ikan Nila (tanpa kolam)	Perlu menjaga ketersediaan produksi ikan Nila di Kabupaten Sragen bagi kelompok pembudidaya pemula	paket budidaya Nila	Rp 30.000.000	Kriteria calon penerima : 1. calon Kelompok penerima hibah sudah ber badan Hukum dan telah terdaftar dalam Surat Keputusan Bupati 2. Masih aktif kepengurusannya 3. Surat keterangan domisili dari lurah/ kepala desa setempat; 4. Memiliki sumber daya air yang memadai untuk kegiatan budidaya ikan; 5. memiliki lahan untuk kegiatan budidaya ikan secara berkelanjutan 6. bantuan hibah barang berupa (benih nila, pakan ikan) 7. Sudah termasuk biaya operasinya		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
							4 Budidaya Ikan Nila di KJA	Perlu menjaga ketersediaan produksi ikan Nila di Kabupaten Sragen bagi kelompok pembudidaya pemula	paket budidaya Nila	Rp 100.000.000	Kriteria calon penerima : 1. calon Kelompok penerima hibah sudah ber badan Hukum dan telah terdaftar dalam Surat Keputusan Bupati 2. Masih aktif kepengurusannya 3. Surat keterangan domisili dari lurah/ kepala desa setempat; 4. Memiliki sumber daya air yang memadai untuk kegiatan budidaya ikan; 5. memiliki lahan untuk kegiatan budidaya ikan secara berkelanjutan 6. bantuan hibah barang berupa benih nila, pakan ikan. 7. Sudah termasuk biaya operasinya		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Prioritas	PROGR AM	INDIKAT OR	TARGET 2027	TEMATIK	KODE	SUB KEGIATAN	USULAN LENGKAP	CONTOH URAIAN PERMASALAHAN	SATUAN	ESTIMASI BIAYA	SYARAT DAN KETENTUAN	KET	OPD
							5 Budidaya Ikan Gurami (Tanpa Kolam)	Perlunya menjaga ketersediaan produksi ikan di Kabupaten Sragen bagi kelompok pembudidaya pemula	Budidaya Ikan Gurami (Tanpa Kolam)	Rp 60.000.000	Kriteria calon penerima : 1. calon Kelompok penerima hibah sudah berbadan Hukum dan telah terdaftar dalam Surat Keputusan Bupati 2. Masih aktif kepengurusannya 3. Surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; 4. Memiliki sumber daya air yang memadai untuk kegiatan budidaya ikan; 5. memiliki lahan untuk kegiatan budidaya ikan secara berkelanjutan 6. bantuan hibah barang berupa (benih GURAMI, pakan ikan) 7. Sudah termasuk biaya operasinya		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	PROGR M PENGEL OLAAN PERIKA NAN TANGKA P	Prosentase Peningkatan produksi perikanan tangkap	1,75		3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan Nelayan Kecil	Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Perlengkapan (Waduk)	Perlunya menjaga ketersediaan produksi ikan tangkapan bagi kelompok nelayan	paket	Rp 27.000.000	Kriteria calon penerima : 1. calon Kelompok penerima hibah sudah berbadan Hukum dan telah terdaftar dalam Keputusan Bupati 2. Masih aktif kepengurusannya 3. Surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; 4. Nama Kelompok dan ketua beserta nomor telepon (anggota kelompok berjumlah minimal 6 orang) 5. Alamat lengkap (Dukuh, RT, Desa dan Kec.)		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
							Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu Perlengkapan (Sungai)	Perlunya menjaga ketersediaan produksi ikan tangkapan bagi kelompok nelayan	paket	Rp 26.500.000	Kriteria calon penerima : 1. calon Kelompok penerima hibah sudah ber Badan Hukum dan telah terdaftar dalam Keputusan Bupati 2. Masih aktif kepengurusannya 3. Surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; 4. Nama Kelompok dan ketua beserta nomor telepon (anggota kelompok berjumlah minimal 6 orang) 5. Alamat lengkap (Dukuh, RT, Desa dan Kec.)		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	PROGR M PENGOL AHAN DAN PEMASA RAN HASIL PERIKA NAN	Angka Konsumsi Ikan	22,36		3.25.06.2.03.0002	02. pemberian Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Pelatihan Olahan Pemindangan Ikan - Bantuan sarana dan prasarana pengolahan pemindangan ikan	perlunya produksi olahan ikan pindang / presto bagi kelompok pengolahan milenial dan ibu rumah tangga dan pemasaran hasil perikanan	Paket sarpras olahan	Rp 25.000.000	Kriteria calon penerima : 1. calon Kelompok penerima hibah sudah ber Badan Hukum dan telah terdaftar dalam Keputusan Bupati 2. Masih aktif kepengurusannya 3. Surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; 4. Nama Kelompok dan ketua beserta nomor telepon (anggota kelompok berjumlah minimal 6 orang) 5. Alamat lengkap (Dukuh, RT, Desa dan Kec.)		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Prioritas	PROGR AM	INDIKAT OR	TARGET 2027	TEMATIK	KODE	SUB KEGIATAN	USULAN LENGKAP	CONTOH URAIAN PERMASALAHAN	SATUAN	ESTIMASI BIAYA	SYARAT DAN KETENTUAN	KET	OPD
							Pelatihan Olahan Berbasis Lumutan Daging Ikan - Bantuan sarana dan prasarana olahan berbasis lumutan daging ikan	Perlunya menjaga ketersediaan produksi olahan naget, bakso, pangsit, abon dan kerupuk ikan di Kabupaten Sragen bagi kelompok pengolahan milenial dan ibu rumah tangga dan pemasaran hasil perikanan	Paket sarpras olahan	Rp 25.000.000	Kriteria calon penerima : 1. calon Kelompok penerima hibah sudah ber Badan Hukum dan telah terdaftar dalam Keputusan Bupati 2. Masih aktif kepengurusannya 3. Surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; 4. Nama Kelompok dan ketua beserta nomor telepon (anggota kelompok berjumlah minimal 6 orang) 5. Alamat lengkap (Dukuh, RT, Desa dan Kec.)		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
							Pelatihan Olahan Ikan Krispi - Bantuan sarana dan prasarana olahan ikan krispi	Perlunya menjaga ketersediaan produksi olahan ikan krispi di Kabupaten Sragen bagi kelompok pengolahan milenial dan ibu rumah tangga dan pemasaran hasil perikanan	Paket sarpras olahan	Rp 25.000.000	Kriteria calon penerima : 1. calon Kelompok penerima hibah sudah ber Badan Hukum dan telah terdaftar dalam Keputusan Bupati 2. Masih aktif kepengurusannya 3. Surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; 4. Nama Kelompok dan ketua beserta nomor telepon (anggota kelompok berjumlah minimal 6 orang) 5. Alamat lengkap (Dukuh, RT, Desa dan Kec.)		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	PROGRAM PENYELANGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik	83,76	belanja infrastruktur pelayanan publik	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan	2 Rekonstruksi Jalan Kabupaten	Kondisi Jalan Kabupaten rusak	paket	Besar anggaran harus bisa mencukupi kegiatan/kerusakan yang akan ditangani	Kriteria usulan: 1. Lokasi berada di ruas jalan status kewenangan Kabupaten Sragen (SK Bupati Nomor: 620/419/002/2016). 2. Usulan wajib menyertakan panjang, lebar kerusakan dan kondisi eksisting. 3. Usulan wajib menyertakan titik koordinat (dan atau link Google Maps), foto lokasi dan kontak person yang mengetahui titik kerusakan. 4. Koordinasi dengan DPU.	sesuai SK Bupati No. 620/419/002/2016 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan di Kabupaten Sragen menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum
					1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan	3 Rehabilitasi Jalan Kabupaten	Kondisi Jalan Kabupaten rusak	paket	Besar anggaran harus bisa mencukupi kegiatan/kerusakan yang akan ditangani	Kriteria usulan: 1. Lokasi berada di ruas jalan status kewenangan Kabupaten Sragen (SK Bupati Nomor: 620/419/002/2016). 2. Usulan wajib menyertakan panjang, lebar kerusakan dan kondisi eksisting. 3. Usulan wajib menyertakan titik koordinat (dan atau link Google Maps), foto lokasi dan kontak person yang mengetahui titik kerusakan. 4. Koordinasi dengan DPU.	sesuai SK Bupati No. 620/419/002/2016 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan di Kabupaten Sragen menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum
					1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan	4 Pembangunan Jembatan Kabupaten	Kondisi Jembatan Kabupaten rusak	paket	Besar anggaran harus bisa mencukupi kegiatan/kerusakan yang akan ditangani	Kriteria usulan: 1. Lokasi berada di ruas jalan status kewenangan Kabupaten Sragen (SK Bupati Nomor: 620/419/002/2016). 2. Usulan wajib menyertakan panjang, lebar kerusakan dan kondisi eksisting. 3. Usulan wajib menyertakan titik koordinat (dan atau link Google Maps), foto lokasi dan kontak person yang mengetahui titik kerusakan. 4. Koordinasi dengan DPU.	SK Bupati No. 620/419/002/2016 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan di Kabupaten Sragen menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum

Prioritas	PROGR AM	INDIKAT OR	TARGET 2027	TEMATIK	KODE	SUB KEGIATAN	USULAN LENGKAP	CONTOH URAIAN PERMASALAHAN	SATUAN	ESTIMASI BIAYA	SYARAT DAN KETENTUAN	KET	OPD
					1.03.10. 2.01.005 8	Rehabilitasi Jembatan	5 Rehabilitasi Jembatan Kabupaten	Kondisi Jembatan Kabupaten rusak	paket	Besar anggaran harus bisa mencukupi kegiatan/kerusakan yang akan ditangani	Kriteria usulan: 1. Lokasi berada di ruas jalan status kewenangan Kabupaten Sragen (SK Bupati Nomor: 620/419/002/2016). 2. Usulan wajib menyertakan panjang, lebar kerusakan dan kondisi eksisting. 3. Usulan wajib menyertakan titik koordinat (dan atau link Google Maps), foto lokasi dan kontak person yang mengetahui titik kerusakan. 4. Koordinasi dengan DPU.	SK Bupati No. 620/419/002/2016 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan di Kabupaten Sragen menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	89,25	belanja infrastruktur pelayanan publik	1.03.08. 2.01.000 2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	7 Pembangunan Gapura Batas Desa	Masih adanya tugu perbatasan antar desa yang belum dibangun.	unit	Rp 80.000.000	Kriteria usulan : 1. Status lahan kas/hibah. 2. surat pernyataan kesanggupan penyediaan lokasi.	sesuai SK Jalan dan jembatan Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas layanan Irigasi multikomoditas	74,65		1.03.02. 2.02.004 2	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	6 Pembangunan sumur dalam	Masih adanya lahan persawahan yang kekurangan air	paket	Rp 200.000.000	Kriteria usulan : 1. Status lahan kas/hibah, 2. Ada sumber air tanahnya / Zona CAT (Cekungan Air Tanah) 3. Dekat dengan jaringan listrik 4. Biaya sekitar 200jt terdiri Sumur, bangunan dan listrik . 5. Penerima Kelompok tani / Gapoktan berbadan hukum , Desa 6. Peruntukan sumur untuk pertanian (IRIGASI) 7. Dekat dengan Trafo dengan daya yang mencukupi	Sumur kedalaman 80 Meter, Status Barjas dihibahkan	Dinas Pekerjaan Umum
					1.03.02. 2.02.004 2	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	6 Pembangunan sumur	Masih adanya lahan persawahan yang kekurangan air	paket	Rp 150.000.000	Kriteria usulan : 1. Status lahan kas/hibah, 2. Ada sumber air tanahnya , harus di dalam Zona CAT (Sub zona aman 1 dan 2) 3. Dekat dengan jaringan listrik 4. Biaya sekitar 150jt terdiri Sumur dan listrik . 5. Penerima Kelompok tani / Gapoktan berbadan hukum/P3A/GP3A/ Desa 6. Peruntukan sumur untuk pertanian (IRIGASI) 7. Dekat dengan Trafo dengan daya yang mencukupi	Sumur kedalaman 80 Meter, Status Barjas dihibahkan	Dinas Pekerjaan Umum
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	64,62		1.03.06. 1.01.000 8	Pembangunan Sistem Drainase/ Gorong-gorong Perkotaan	1 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Adanya kerusakan atau belum tersedianya drainase.	paket	Menyesuaikan kemampuan daerah	Kriteria usulan: 1. Lokasi berada di ruas jalan status kewenangan Kabupaten Sragen (SK Bupati Nomor: 620/419/002/2016). 2. Jenis Konstruksi: Pasangan Batu/Beton. 3. Usulan wajib menyertakan panjang dan lebar kerusakan. 4. Usulan wajib menyertakan titik koordinat (dan atau link Google Maps), foto lokasi dan kontak person yang mengetahui titik kerusakan. 5. Koordinasi dengan DPU.	Koordinasi DPU dan menyesuaikan standar belanja daerah	Dinas Pekerjaan Umum

Prioritas	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2027	TEMATIK	KODE	SUB KEGIATAN	USULAN LENGKAP	CONTOH URAIAN PERMASALAHAN	SATUAN	ESTIMASI BIAYA	SYARAT DAN KETENTUAN	KET	OPD
	PROGRAM PENYELANGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	68,10	Penggunaan atas hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB	2.15.02.2.06.0002	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pengadaan dan Pemasangan Rambu lalu lintas	Pengadaan dan Pemasangan Rambu lalu lintas di jalan uk.60 x 60 cm	paket	Rp 7.750.000	Kriteria usulan : 1. lokasi di ruas jalan status kewenangan Kabupaten Sragen 2. per unit harga Rp.1.550.000 3. minimal pengadaan 5 unit		Dinas Perhubungan
								Pengadaan dan Pemasangan Rambu lalu lintas di jalan uk.75 x 75 cm	paket	Rp 9.250.000	Kriteria usulan : 1. lokasi di ruas jalan status kewenangan Kabupaten Sragen 2. Per unit harga Rp.1850000 3. minimal pengadaan 5 unit		Dinas Perhubungan
								Pekerjaan pengadaan dan pemasangan rambu pendahuluan petunjuk Jurusan (RPPJ) ukuran 120 x 240 cm	unit	Rp 43.500.000	Kriteria usulan : 1. lokasi di ruas jalan status kewenangan Kabupaten Sragen 2. Per unit harga Rp.14.500.000 3. Ukuran plat daun rambu RPPJ 120 x 240 cm 4. Pengadaan Minimal 3 unit		Dinas Perhubungan
								Pekerjaan pengadaan dan pemasangan rambu pendahuluan petunjuk Jurusan (RPPJ) ukuran 120 x 90 cm portabel	paket	Rp 17.500.000	Kriteria usulan : 1. lokasi di ruas jalan status kewenangan Kabupaten Sragen 2. Per unit harga Rp. 3.500.000 3. Ukuran plat daun rambu RPPJ 120 x 90 cm portabel 4. Pengadaan minimal 5 unit		Dinas Perhubungan
								Pengadaan dan Pemasangan Rambu lalu lintas	paket	Rp 73.000.000	Kriteria usulan : 1. lokasi di ruas jalan status kewenangan Kabupaten Sragen 2. Pengadaan dan Pemasangan minimal 2 Unit		Dinas Perhubungan
								Pengadaan dan Pemasangan Rambu lalu lintas	paket	Rp 65.000.000	Kriteria usulan : 1. lokasi di ruas jalan status kewenangan Kabupaten Sragen 2. Harga per beam Rp. 6.500.000 3. Pengadaan dan Pemasangan minimal 10 beam		Dinas Perhubungan
								Pengadaan dan Pemasangan Rambu lalu lintas	paket	Rp 12.500.000	Kriteria usulan : 1. lokasi di ruas jalan status kewenangan Kabupaten Sragen 2. Harga per unit 6.250.000 3. Pengadaan dan Pemasangan minimal 2 Unit		Dinas Perhubungan
				Penggunaan atas hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan (Konvensional)	Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan (Konvensional)	paket	Rp 188.500.000	Kriteria usulan : 1. dalam 1 lokasi di ruas jalan status kewenangan Kabupaten Sragen 2. Pengadaan dan Pemasangan 1 APP minimal 10 unit dalam 1 rangkaian dengan tinggi tiang 9 meter dengan harga per unit Rp.18.000.000 3. Termasuk Set APP BOX dan sambungan Listrik sebesar Rp.8.500.000		Dinas Perhubungan

Prioritas	PROGR AM	INDIKAT OR	TARGET 2027	TEMATIK	KODE	SUB KEGIATAN	USULAN LENGKAP	CONTOH URAIAN PERMASALAHAN	SATUAN	ESTIMASI BIAYA	SYARAT DAN KETENTUAN	KET	OPD
							Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan (Konvensional)	Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan (Konvensional)	paket	Rp.91.520.000	Kriteria usulan : 1. dalam 1 lokasi di ruas jalan status kewenangan Kabupaten Sragen 2. Pengadaan dan Pemasangan 1 APP minimal 5 unit dalam 1 rangkaian dengan tinggi tiang 7 meter , dengan harga per unit Rp.16.604.000 3. Termasuk Set APP BOX dan sambungan Listrik sebesar Rp.8.500.000		Dinas Perhubungan
							Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan (Konvensional)	Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan (Konvensional)	paket	Rp72.372.572,00	Kriteria usulan : 1. dalam 1 lokasi di ruas jalan status kewenangan Kabupaten 2. Pengadaan dan Pemasangan 1 APP minimal 4 unit dalam 1 rangkaian dengan tinggi tiang 7 meter , dengan harga per unit Rp. Rp 15.968.143 3. Termasuk Set APP BOX dan sambungan Listrik sebesar Rp.8.500.000		Dinas Perhubungan
				Penggunaan atas hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan prasarana jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Halte	Pembangunan halte sederhana	unit	Rp 40.000.000	Kriteria usulan: 1. Lokasi di ruas jalan status kewenangan Kabupaten Sragen 2. Ukurannya lebar 4 meter x 1,5 meter 3. Atap dari galvalum dan tempat duduk dari hollow		Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	30,00	belanja infrastruktur pelayanan publik	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				Disesuaikan kemampuan daerah	Kriteria usulan: 1. Kepemilikan aset desa (bersertifikat), bukan tanah OO, bukan milik perorangan, bukan tanah wakaf, kecuali jalan dan talud 2. Bantuan berupa Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa 3. alamat dan Calon penerima 4. Mempedomani Peraturan Bupati No 52 Tahun 2023 tentang BKK		BPKPD dan / DPMD
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	40,00				1 Pengecoran jalan desa	Jalan desa rusak	paket	Disesuaikan kemampuan daerah		Dalam Peruntukannya Agar Koordinasi dengan BPKPD dan / DPMD	BPKPD dan / DPMD
		Persentase Perangkat Daerah yang merealisasikan anggaran sesuai dengan perencanaan	92,00				2 Pengaspalan jalan desa	Jalan desa rusak	paket	Disesuaikan kemampuan daerah			BPKPD dan / DPMD

Prioritas	PROGR AM	INDIKAT OR	TARGET 2027	TEMATIK	KODE	SUB KEGIATAN	USULAN LENGKAP	CONTOH URAIAN PERMASALAHAN	SATUAN	ESTIMASI BIAYA	SYARAT DAN KETENTUAN	KET	OPD
		Persentase laporan Perangkat Daerah tepat waktu serta sesuai dengan standar SAP	100,00				3	Makadam jalan desa	Jalan desa masih belum perkerasan	paket	Disesuaikan kemampuan daerah		BPKPD dan / DPMD
							4	Pembangunan jembatan desa	masih perlunya jembatan	paket	Disesuaikan kemampuan daerah		BPKPD dan / DPMD
							5	Perbaikan jembatan desa	Jembatan desa rusak	paket	Disesuaikan kemampuan daerah		BPKPD dan / DPMD
							6	Talud jalan desa	Talud Jalan Desa rusak	paket	Disesuaikan kemampuan daerah		BPKPD dan / DPMD
							7	Drainase jalan desa	Belum optimalnya fungsi Saluran Air/Drinase desa	paket	Disesuaikan kemampuan daerah		BPKPD dan / DPMD
							8	Gorong-gorong jalan desa	Sungai kecil banyak yang kurang lancar alirannya	paket	Disesuaikan kemampuan daerah		BPKPD dan / DPMD
							9	sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Kurangnya kebutuhan air bersih terutama musim kemarau	paket	Disesuaikan kemampuan daerah		BPKPD dan / DPMD
							10	Lapangan desa	Lapangan Desa kurang tertata	paket	Disesuaikan kemampuan daerah		BPKPD dan / DPMD
							11	sanitasi lingkungan desa	Masih adanya lingkungan pemukiman desa yang belum mempunyai tempat MCK	paket	Disesuaikan kemampuan daerah		BPKPD dan / DPMD
							12	Sumur peresapan air hujan (SPAHI)	Perlunya cdangan air di musim kekeringan	paket	Disesuaikan kemampuan daerah	BUKAN MILIK PERORANGAN	BPKPD dan / DPMD
							13	Pengadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) desa	Kurangnya kesadaran membuang sampah di tempatnya	paket	Disesuaikan kemampuan daerah		BPKPD dan / DPMD
							14	balai pertemuan warga di tanah milik desa	Gedung Pertemuan Desa belum memadai	paket	Disesuaikan kemampuan daerah		BPKPD dan / DPMD
							15	Tempat ibadah desa	Tempat Ibadah belum memadai	paket	Disesuaikan kemampuan daerah		BPKPD dan / DPMD
							16	Pengadaan sarpras paud desa	Sarpras Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa belum memadai	paket	Disesuaikan kemampuan daerah		BPKPD dan / DPMD
							17	Penyediaan sarpras perpustakaan desa	Minimnya Prasarana Perpustakaan Atau Taman Bacaan Milik Desa	paket	Disesuaikan kemampuan daerah		BPKPD dan / DPMD
							18	Pemeliharaan Poliklinik desa	Poliklinik kesehatan desa belum memadai	paket	Disesuaikan kemampuan daerah		BPKPD dan / DPMD
							19	Pembangunan Poliklinik desa	Poliklinik kesehatan desa belum memadai	paket	Disesuaikan kemampuan daerah		BPKPD dan / DPMD
							20	Penataan pasar desa	Pasar Desa belum tertata baik	paket	Disesuaikan kemampuan daerah		BPKPD dan / DPMD
							21	Pembuatan sarana energi baru terbarukan (bio gas) desa	Limbah ternak belum dioptimalkan penggunaannya	paket	Disesuaikan kemampuan daerah		BPKPD dan / DPMD

Prioritas	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2027	TEMATIK	KODE	SUB KEGIATAN	USULAN LENGKAP	CONTOH URAIAN PERMASALAHAN	SATUAN	ESTIMASI BIAYA	SYARAT DAN KETENTUAN	KET	OPD
							22 Pembangunan jalan usaha tani	Jalan Usaha Tani belum memadai untuk prasarana transportasi pertanian	paket	Disesuaikan kemampuan daerah			BPKPD dan / DPMD
							23 Optimalisasi pengelolaan BUMDesa (infrastruktur BUMDesa)	infrastruktur unggulan BUMDesa belum maksimal	paket	Disesuaikan kemampuan daerah			BPKPD dan / DPMD
							24 sarana prasarana Pemerintahan Desa	pelayanan publik	paket	Disesuaikan kemampuan daerah			BPKPD dan / DPMD
							25 sarana prasarana Pemerintahan Desa	Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan (Konvensional)	paket	Rp72.372.572,00	Kriteria usulan : 1. dalam 1 lokasi di ruas jalan status kewenangan desa 2. Pengadaan dan Pemasangan 1 APP minimal 4 unit dalam 1 rangkaian dengan tinggi tiang 7 meter , dengan harga per unit Rp.Rp 15.968.143 3. Termasuk Set APP BOX dan sambungan Listrik sebesar Rp.8.500.000		BPKPD dan / DPMD
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	prosentase pengendalian pencemaran sungai di wilayah perkotaan	100		2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Pembuatan Sumur Resapan	Pembuatan Sumur Resapan	unit	Rp 15.000.000	Kriteria calon penerima : 1. Mengajukan proposal 2. Kelompok ada badan hukum/Srt ijin Kemenhukham 3. Surat Keterangan kesediaan lokasi 4. Desa/sekolah permohonan a.n. kepala Desa/ Kepala Sekolah 5. Sudah termasuk biaya operasinya		Dinas Lingkungan Hidup
					2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi	pengadaan bibit tanaman keras non buah-buahan untuk penghijauan	Pencemaran udara	paket	Rp 55.000.000	Kriteria calon penerima : 1. Mengajukan proposal 2. Kelompok ada badan hukum/Srt ijin Kemenhukham 3. Surat Keterangan kesediaan lokasi 4. Jumlah bibit disesuaikan anggaran		Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Nilai Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IPKS)	48,80		2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1 Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pengelolaan sampah	Sosialisasi dan pelatihan	paket	Rp 50.000.000	Kriteria peserta : 1. Jumlah peserta 100 orang/menyesuaikan 2. Tersedia perlengkapan sosialisasi dan pelatihan		Dinas Lingkungan Hidup
							Tong Sampah Pemilah	Tong sampah pemilah	1 paket	Rp 30.000.000	Kriteria : 1. Mengajukan Proposal 2. Bantuan Tong Sampah untuk 20 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)/ RT	Kriteria calon penerima : 1. Mengajukan proposal 2. Pemerintah Kelurahan atau Kelompok masyarakat yang berbadan hukum/Srt ijin Kemenhukham 3. jumlah unit tong sampah menyesuaikan jenis tong sampah dan jumlah anggaran yang tersedia	Dinas Lingkungan Hidup
							Pengadaan Kendaraan Roda Tiga sampah	Roda Tiga untuk sampah	1 unit	Rp 50.000.000	Kriteria calon penerima : 1. Mengajukan proposal 2. Skala Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)/Rumah tangga 1 kebayanan	Kriteria calon penerima : 1. Mengajukan proposal 2. Pemerintah Kelurahan atau Kelompok masyarakat yang berbadan hukum/Srt ijin Kemenhukham	Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas	PROGR AM	INDIKAT OR	TARGET 2027	TEMATIK	KODE	SUB KEGIATAN	USULAN LENGKAP	CONTOH URAIAN PERMASALAHAN	SATUAN	ESTIMASI BIAYA	SYARAT DAN KETENTUAN	KET	OPD
PD2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Gesit, Responsif dan Kolaboratif	PROGRAM PENYELANGGARAN Pemerintah Umum yang terkoordinasikan dengan baik	Persentase penyelenggaraan Pemerintah Umum yang terkoordinasikan dengan baik	100,00	keselarasan anggaran dengan asta cita	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	kegiatan keagamaan	pentingnya menjaga kerukunan umat beragama (disebutkan nama Kecamatan)	paket	Rp 50.000.000	Kriteria calon peserta : 1. Lokasi di kecamatan 2. Jumlah peserta 100 Orang atau disesuaikan pagu anggaran (maksimal 200 juta) 3. Biaya termasuk makan minum, uang saku peserta dan honorarium narasumber 4. sasaran masyarakat umum, pemuda, toga, tomas dll		semua kecamatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga desa yang aktif	100	belanja infrastruktur pelayanan publik	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan	drainase, selokan	saluran air yang kurang lancar, pembangunan talud	paket	Disesuaikan kemampuan daerah	Kriteria 1. Lokasi di KELURAHAN 2. Sudah termasuk biaya operasionalnya		kecamatan Sragen, Karangmalang dan Gemolong
						Pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan	talud Jalan	Pembangunan Talud	paket	Disesuaikan kemampuan daerah	Kriteria : 1. Lokasi di KELURAHAN 2. Sudah termasuk biaya operasionalnya	Koordinasi Kecamatan dan menyesuaikan standar belanja daerah; kegiatan mempedomani Perbup 16 tahun 2019	kecamatan Sragen, Karangmalang dan
						Pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan	sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya	Minimnya sarana dan prasarana permukiman	paket	Disesuaikan kemampuan daerah	Kriteria : 1. Lokasi di KELURAHAN 2. Sudah termasuk biaya operasionalnya		kecamatan Sragen, Karangmalang dan
						Pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan	jalan pemukiman;	Kerusakan jalan pemukiman	paket	Disesuaikan kemampuan daerah	Kriteria : 1. Lokasi di KELURAHAN 2. Sudah termasuk biaya operasionalnya		kecamatan Sragen, Karangmalang dan
						Pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan	Rehabilitasi Jembatan	Jembatan rusak		Disesuaikan kemampuan daerah	Kriteria : 1. Lokasi di KELURAHAN 2. Sudah termasuk biaya operasionalnya		kecamatan Sragen, Karangmalang dan
						Pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan	jalan poros Kelurahan	Kerusakan jalan kelurahan	paket	Disesuaikan kemampuan daerah	Kriteria : 1. Lokasi di KELURAHAN 2. Sudah termasuk biaya operasionalnya		kecamatan Sragen, Karangmalang dan
						Pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan	mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal	Masih adanya sanitasi permukiman yang kurang layak	paket	Disesuaikan kemampuan daerah	Kriteria : 1. Lokasi di KELURAHAN 2. Sudah termasuk biaya operasionalnya		kecamatan Sragen, Karangmalang dan
						Pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan	pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu	Kurangnya sarpras posyandu	unit	Disesuaikan kemampuan daerah	Kriteria : 1. Lokasi di KELURAHAN 2. Sudah termasuk biaya operasionalnya		kecamatan Sragen, Karangmalang dan
						Pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan	bangunan pendidikan anak usia dini	Belum memadainya bangunan pendidikan anak usia dini	paket	Disesuaikan kemampuan daerah	Kriteria : 1. Lokasi di Tanah Aset Kelurahan 2. Sudah termasuk biaya operasionalnya		kecamatan Sragen, Karangmalang dan
						Pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan	wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini	Belum memadainya permainan anak dipendidikan anak usia dini	paket	Disesuaikan kemampuan daerah	Kriteria 1. Lokasi di Tanah Aset Kelurahan 2. Sudah termasuk biaya operasionalnya		kecamatan Sragen, Karangmalang dan

Prioritas	PROGR AM	INDIKAT OR	TARGET 2027	TEMATIK	KODE	SUB KEGIATAN	USULAN LENGKAP	CONTOH URAIAN PERMASALAHAN	SATUAN	ESTIMASI BIAYA	SYARAT DAN KETENTUAN	KET	OPD
						Pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan	sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan	kurang memadai sarana prasarana pendidikan	paket	Disesuaikan kemampuan daerah	Kriteria : 1. Lokasi di KELURAHAN 2. Sudah termasuk biaya operasionalnya 3. Khusus untuk DAU Kelurahan		kecamatan Sragen, Karangmalang dan
						Pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan	penataan dan rehab lapangan kelurahan	kurang memadai lapangan kelurahan	paket	Disesuaikan kemampuan daerah	Kriteria : 1. Lokasi di KELURAHAN 2. Sudah termasuk biaya operasionalnya 3. Khusus untuk DAU Kelurahan		kecamatan Sragen, Karangmalang dan
						Pembangunan Sarana dan prasarana kelurahan	Penerangan jalan	masih adanya jalan kondisi gelap	paket	Rp72.372.572,00	Kriteria usulan : 1. dalam 1 lokasi di ruas jalan status Kabupaten Sragen 2. Pengadaan dan Pemasangan 1 APP minimal 4 unit dalam 1 rangkaian dengan tinggi tiang 7 meter , dengan harga per unit Rp.Rp 15.968.143 3. Termasuk Set APP BOX dan sambungan Listrik sebesar Rp.8.500.000		kecamatan Sragen, Karangmalang dan Gemolong
					7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	pelatihan kader kesehatan masyarakat (tidak untuk kegiatan studi banding dll), pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat, dan pemberian PMT Balita dan Lansia	paket	Disesuaikan kemampuan daerah	Kriteria : 1. Lokasi di KELURAHAN 2. Sudah termasuk biaya operasionalnya		kecamatan Sragen, Karangmalang dan Gemolong
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah yang Dilaksana	100	keselarasan anggaran dengan asta cita	8.01.05.2.01.0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Fasilitasi keg. keagamaan untuk memperkuat nilai2 spritual dan persatuan	menjalin kerukunan umat beragama	paket	Rp 50.000.000	Kriteria peserta : 1. kalangan toga, masyarakat dll 2. Jumlah peserta 100 Orang atau disesuaikan pagu anggaran 3. Biaya termasuk makan minum, uang saku peserta dan honorarium narasumber		Badan Kesbangpol

Prioritas	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2027	TEMATIK	KODE	SUB KEGIATAN	USULAN LENGKAP	CONTOH URAIAN PERMASALAHAN	SATUAN	ESTIMASI BIAYA	SYARAT DAN KETENTUAN	KET	OPD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	28,44	keselarasan anggaran dengan asta cita	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Sosialisasi Pembinaan Ormas Kesenian Bela Diri (IPSI)	Mendorong peran serta Ormas untuk memberikan kontribusi besar dalam mengawal setiap kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan mengelola Ormas secara terkoordinasi dan berkesinambungan di kabupaten Sragen.	paket	Rp 50.000.000	Kriteria peserta : 1. Kalangan Ormas 2. Jumlah peserta 100 Orang atau disesuaikan pagu anggaran 3. Biaya termasuk makan minum, uang saku peserta dan honorarium narasumber		Badan Kesbangpol
					8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Hibah Ormas	Mendorong peran serta Ormas untuk memberikan kontribusi besar dalam mengawal setiap kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan mengelola Ormas secara terkoordinasi dan berkesinambungan di kabupaten Sragen.	paket	Disesuaikan kemampuan daerah	Kriteria calon penerima: 1. Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan sudah Berbadan Hukum Indonesia dan terdaftar di Kesbangpol 2. Tidak mendapatkan hibah secara terus menerus dalam dua tahun	Perbup No. 5 Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah dan Bansos dari APBD Kab. Sragen dan Perbup No. 60 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perbup No. 5 Tahun 2021	Badan Kesbangpol
PD 3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkarier Tangguh, Adaptif, dan Berbudaya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APIK) PAUD	71,00	Pendidikan	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rehabilitasi sedang ruang kelas	adanya kondisi ruang kelas SD negeri yang rusak sedang di(sebutkan nama Sekolahnya)	paket	sesuai tingkat kerusakan	Kriteria calon penerima : 1. PAUD negeri/swasta kecuali yang berada dibawah kewenangan kemenag 2. Satuan Pendidikan swasta wajib mengikuti ketentuan Hibah yang berlaku 3. Estimasi biaya termasuk BUP	Koordinasi Dinas pendidikan dan menyesuaikan standar belanja daerah	Disdikbud
				Penandaan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten	1.01.02.2.01.0046 1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (seragam siswa, sepatu, Tas dll)	kebutuhan seragam siswa, sepatu, tas bagik miskin	paket	sesuai tingkat kerusakan	Kriteria calon penerima : 1. SD / SMP negeri/swasta kecuali yang berada dibawah kewenangan kemenag 2. Satuan Pendidikan swasta wajib mengikuti ketentuan Hibah yang berlaku 3. Estimasi biaya termasuk BUP	Prioritas Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Disdikbud
		Angka Partisipasi Kasar (APIK) SD/MI/Paket A/SDLB	100,00	Penandaan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten	1.01.02.2.01.0048 1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi sedang SARPRAS sekolah SD/SMP Negeri/ swasta	adanya kondisi KM/WC sekolah negeri yang rusak sedang di(sebutkan nama Sekolahnya)	paket	sesuai tingkat kerusakan	Kriteria calon penerima : 1. SD / SMP negeri/swasta kecuali yang berada dibawah kewenangan kemenag 2. Satuan Pendidikan swasta wajib mengikuti ketentuan Hibah yang berlaku 3. Estimasi biaya termasuk BUP	Prioritas Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Disdikbud
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/SDLB	95,50	Pendidikan	1.01.02.2.01.0011 1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rehabilitasi sedang Perpustakaan SD/SMP negeri/swasta	adanya kondisi Perpustakaan sekolah negeri yang rusak sedang di(sebutkan nama Sekolahnya)	paket	sesuai tingkat kerusakan	Kriteria calon penerima : 1. SD / SMP negeri/swasta kecuali yang berada dibawah kewenangan kemenag 2. Satuan Pendidikan swasta wajib mengikuti ketentuan Hibah yang berlaku 3. Estimasi biaya termasuk BUP	Prioritas Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Disdikbud

Prioritas	PROGR AM	INDIKAT OR	TARGET 2027	TEMATIK	KODE	SUB KEGIATAN	USULAN LENGKAP	CONTOH URAIAN PERMASALAHAN	SATUAN	ESTIMASI BIAYA	SYARAT DAN KETENTUAN	KET	OPD
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS /Paket B/SMPPLB	89,00	Pendidikan	1.01.02.2.01.0014 1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mebel Ruang Kelas/ Ruang Perpustakaan SD/SMP negeri/swasta	Perlunya pengadaan mebel Ruang kelas/ Ruang perpustakaan di SD Negeri(sebutkan nama Sekolahnya)	paket	1. Mebel RKB SD Rp. 25.000.000,00 per ruang, 2. Mebel RKB SMP Rp. 31.200.000,00 per kelas , 3. Mebel Ruang Perpustakaan SD Rp. 15.000.000 Per ruang, 4. Mebel Perpustakaan SMP Rp. 36.400.000,00 per ruang	Kriteria calon penerima : 1. SD / SMP negeri/swasta kecuali yang berada dibawah kewenangan kemenag 2. Satuan Pendidikan swasta wajib mengikuti ketentuan Hibah yang berlaku 3. Estimasi biaya termasuk BUP	Prioritas Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Disdikbud
		Angka Kelulusan Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan	98,40	Pendidikan	1.01.02.2.01.0055 1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD/SMP negeri/swasta	belum terpenuhinya alat praktik dan peraga siswa sekolah negeri di....(sebutkan nama Sekolahnya)	paket	sesuai kemampuan daerah	Kriteria calon penerima : 1. SD / SMP negeri/swasta kecuali yang berada dibawah kewenangan kemenag 2. Satuan Pendidikan swasta wajib mengikuti ketentuan Hibah yang berlaku 3. Estimasi biaya termasuk BUP	Prioritas Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Disdikbud
				Penandaaan Penuruna Stunting Kabupaten	1.01.02.2.01.0047 1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD/SMP	Bertambahnya jumlah siswa	unit	1.Pembangunan RKB SD Rp. 250.000.000,00 2.pembangunan RKB SMP Rp.315.000.000,00	Kriteria calon penerima : 1. SD / SMP negeri/swasta kecuali yang berada dibawah kewenangan kemenag 2. Satuan Pendidikan swasta wajib mengikuti ketentuan Hibah yang berlaku 3. Estimasi biaya termasuk BUP	Prioritas Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Disdikbud
				Pendidikan	1.01.02.2.01.0006 1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD/SMP	Kurang memadai kondisi pagar,Paving, Laboratorium sd , dll	paket	sesuai kemampuan daerah	Kriteria calon penerima : 1. SD / SMP negeri/swasta kecuali yang berada dibawah kewenangan kemenag 2. Satuan Pendidikan swasta wajib mengikuti ketentuan Hibah yang berlaku 2. Estimasi biaya termasuk BUP	Prioritas Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Disdikbud
					1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Pembangunan ruang baru PAUD negeri/swasta	adanya kondisi ruang kelas PAUD/TK yang rusak sedang di....(sebutkan nama Paudnya)	paket	Rp 140.000.000	Kriteria calon penerima : 1. TK/PAUD negeri/swasta 2. Satuan Pendidikan swasta wajib mengikuti ketentuan Hibah yang berlaku 3. Estimasi biaya termasuk BUP	Prioritas Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Disdikbud
				Penandaaan Penuruna Stunting Kabupaten	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	adanya kondisi ruang kelas PAUD/TK yang rusak sedang di....(sebutkan nama Paudnya)	unit	sesuai tingkat kerusakan	Kriteria calon penerima : 1. TK/PAUD negeri/swasta 2. Satuan Pendidikan swasta wajib mengikuti ketentuan Hibah yang berlaku 3. Estimasi biaya termasuk BUP	Prioritas Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Disdikbud
				Penandaaan Penuruna Stunting Kabupaten	1.01.02.2.03.0045	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD negeri/swasta	adanya kondisi KM/WC, dll yang perlu perbaikan	paket	1. Pembangunan Perpustakaan PAUD Rp. 140.000.000,00 2. Pembangunan KM/WC Rp. 20.000.000,00	Kriteria calon penerima : 1. TK/PAUD negeri/swasta 2. Satuan Pendidikan swasta wajib mengikuti ketentuan Hibah yang berlaku 3. Estimasi biaya termasuk BUP	Prioritas Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Disdikbud
				Penandaaan Penuruna Stunting Kabupaten	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Pengadaan Sarana dan Prasarana	masih berkurangnya Alat Peraga Edukasi	paket	sesuai kemampuan daerah	Kriteria calon penerima : 1. TK/PAUD negeri/swasta 2. Satuan Pendidikan swasta wajib mengikuti ketentuan Hibah yang berlaku 3. Estimasi biaya termasuk BUP	Prioritas Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Disdikbud

Prioritas	PROGR AM	INDIKAT OR	TARGET 2027	TEMATIK	KODE	SUB KEGIATAN	USULAN LENGKAP	CONTOH URAIAN PERMASALAHAN	SATUAN	ESTIMASI BIAYA	SYARAT DAN KETENTUAN	KET	OPD
					1.01.02. 2.03.000 7	Pengadaan Mebel PAUD	Pengadaan Mebel PAUD	masih adanya mebelair paud yang kurang layak	unit	sesuai kemampuan daerah	Kriteria calon penerima : 1. TK/PAUD negeri/swasta 2. Satuan Pendidikan swasta wajib mengikuti ketentuan Hibah yang berlaku 3. Estimasi biaya termasuk BUP	Prioritas Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Disdikbud
					1.01.02. 2.04.006 0	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Rehabilitasi Ruang Kelas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kesetaraan	adanya kondisi ruang kelas yang rusak sedang di(sebutkan nama Sekolahnya)	paket	sesuai kemampuan daerah	Kriteria calon penerima: 1. Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan sudah Berbadan Hukum 2. hibah berupa uang 3. Tidak mendapatkan secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali sudah ditentukan dalam UU	Prioritas Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Disdikbud
					1.01.02. 2.04.004 8	Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Pengadaan Mebel Ruang Kelas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Perlunya rehab sarana utilitas, mebel, Ruang kelas PKBM di(sebutkan nama Sekolahnya)	unit	sesuai kemampuan daerah	Kriteria calon penerima: 1. Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan sudah Berbadan Hukum 2. hibah berupa uang 3. Tidak mendapatkan secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali sudah ditentukan dalam UU	Prioritas Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Disdikbud
				Penandaan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten	1.01.02. 2.04.001 0	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	bantuan pendidikan anak putus sekolah	anak tidak sekolah/ putus sekolah tidak memiliki biaya untuk bersekolah ke program paket/ kesetaraan	orang	sesuai kemampuan daerah/ pendidikan gratis	Kriteria calon penerima: 1. tercatat penduduk kab. Sragen 2. anak tidak bersekolah/ putus sekolah 3. prioritas dari keluarga tidak mampu	Prioritas Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Disdikbud
					1.01.02. 2.04.004 0	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Hibah barang/ uang kpd PKBM	Perlunya alat praktik/alat peraga untuk mendukung peserta didik non formal/ kesetaraan di(sebutkan nama Sekolahnya)	paket	sesuai kemampuan daerah	Kriteria calon penerima: 1. Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan sudah Berbadan Hukum 2. hibah berupa uang dan tidak untuk kendaraan operasional 3. Tidak mendapatkan secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali sudah ditentukan dalam UU	Hanya untuk pemenuhan kebutuhan siswa/ peserta didik	Disdikbud
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilestarikan	40%		2.22.02. 2.02.000 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Hibah uang yayasan/ organisasi seni	Pembinaan kebudayaan serta bantuan alat kesenian Organisasi/ yayasan seni	paket	sesuai kemampuan daerah	Kriteria calon penerima: 1. Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan sudah Berbadan Hukum 2. Lembaga Non Profit 3. hibah berupa uang dan tidak untuk kendaraan operasional 4. Tidak mendapatkan secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali sudah ditentukan dalam UU	Koordinasi Dinas pendidikan dan menyesuaikan standar belanja daerah	Disdikbud

Prioritas	PROGR AM	INDIKAT OR	TARGET 2027	TEMATIK	KODE	SUB KEGIATAN	USULAN LENGKAP	CONTOH URAIAN PERMASALAHAN	SATUAN	ESTIMASI BIAYA	SYARAT DAN KETENTUAN	KET	OPD
					2.22.02. 2.02.000 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Pertunjukan Rakyat dan pelajar	Pagelaran wayang, sedekah bumi atau lainnya - Kegiatan tidak boleh bertujuan semata-mata sebagai tontonan dan hiburan. Kegiatan harus menghasilkan dampak (Output dan Outcome) pada aspek edukasi dan/atau literasi warisan budaya dan/atau rekonstruksi warisan budaya dan/atau revitalisasi warisan budaya dan/atau pengembangan-inovasi warisan budaya dan atau meningkatkan kapasitas ataupun prestasi:	paket	Rp 100.000.000	Kriteria calon penerima: 1.Lembaga Non Profit 2. kegiatan di belanja dinas pendidikan 3. lokasi tidak di destinasi wisata	prioritas yang mendukung program unggulan daerah/bupati	Disdikbud
					2.22.02. 2.02.000 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Pertunjukan kesenian Rakyat dan pelajar	pentas musik, Campur Sari, Keroncong, Musik Etnik, bersih desa , dll - - Kegiatan tidak boleh bertujuan semata-mata sebagai tontonan dan hiburan. Kegiatan harus menghasilkan dampak (Output dan Outcome) pada aspek edukasi dan/atau literasi warisan budaya dan/atau K149atau rekonstruksi warisan budaya dan/atau revitalisasi warisan budaya dan/atau pengembangan-inovasi warisan budaya dan atau meningkatkan kapasitas ataupun prestasi:	paket	Rp 50.000.000	Kriteria calon penerima: 1.Lembaga Non Profit 2. kegiatan di belanja dinas pendidikan 3. lokasi tidak di destinasi wisata	prioritas yang mendukung program unggulan daerah/bupati	Disdikbud
					2.22.02. 2.01.000 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		masih rendahnya pemahaman para seniman/pelaku seni tentang peraturan hak kekayaan intelektual	paket/ke giatan	Rp 25.000.000	Kegiatan	prioritas yang mendukung program unggulan daerah/bupati	Disdikbud
					2.22.04. 2.01.000 1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota		masih rendahnya pemahaman para pelaku sejarah terkait peraturan hak kekayaan intelektual dan sejarah dan lemahnya pembukuan sejarah	paket/ke giatan	Rp 25.000.000	Kegiatan	prioritas yang mendukung program unggulan daerah/bupati	Disdikbud

Prioritas	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2027	TEMATIK	KODE	SUB KEGIATAN	USULAN LENGKAP	CONTOH URAIAN PERMASALAHAN	SATUAN	ESTIMASI BIAYA	SYARAT DAN KETENTUAN	KET	OPD
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda	12,00		2.19.03	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Bimbingan dan pelatihan teknis bagi kepemudaan untuk berwirausaha	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas subsektor ekonomi kreatif seperti Fotografi, Desain Grafis untuk meningkatkan keterampilan pelaku usaha					Dispora
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAH RAGA	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	63,20			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Pengadaan prasarana olah raga masyarakat		paket		Kriteria calon peserta : 1. Organisasi pemuda/ Karang taruna 2. Alamat Penerima untuk disebutkan dengan jelas		Dispora
								Bola Voli	unit	Rp 825.000			Dispora
								Net Voli	unit	Rp 360.000			Dispora
								Raket badminton	unit	Rp 925.000			Dispora
								Net Badminton	unit	Rp 500.000			Dispora
								Bola Sepak	unit	Rp 885.000			Dispora
								Jaring gawang sepak bola	unit	Rp 5.605.000			Dispora
								sepeda gunung	unit	Rp 2.500.000			Dispora
								Bet ping pong	unit	Rp 370.000			Dispora
								Meja ping pong	unit	Rp 7.205.000			Dispora
								Bola Pingpong	Slope	Rp 100.000			Dispora
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100,00		2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan Sosialisasi Kekerasan Terhadap Perempuan	Masih belum menysasar ke semua Kader P4A	Kegiatan	Rp 24.025.000	Kriteria calon peserta : 1. Kader P4A Kecamatan dan Desa		Dinas KBP3A
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100,00		2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan Sosialisasi Kekerasan Terhadap Anak	Masih belum menysasar ke semua Kader P4A	Kegiatan	Rp 24.025.000	Kriteria calon peserta : 1. Kader P4A Kecamatan dan Desa		Dinas KBP3A

Prioritas	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2027	TEMATIK	KODE	SUB KEGIATAN	USULAN LENGKAP	CONTOH URAIAN PERMASALAHAN	SATUAN	ESTIMASI BIAYA	SYARAT DAN KETENTUAN	KET	OPD
	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	19,9		2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kegiatan Sosialisasi organisasi wanita (ORWAN), Kegiatan Seminar Wanita	Masih belum menysasar ke semua kader organisasi wanita, masih adanya perempuan yang belum terpapar seminar wanita	Kegiatan	Rp 30.825.000	Kriteria calon peserta : 1. Perempuan yang masuk dalam Organisasi Wanita 2. Perempuan yang masuk dalam Organisasi Wanita dan Perwakilan Perempuan		Dinas KBP3A
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (IPHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	63,59		2.08.06.2.02.0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kegiatan Hari Anak Nasional (HAN)	Masih perlu adanya kegiatan Hari Anak Nasional (HAN)	Kegiatan	Rp 70.000.000	Kriteria calon peserta : 1. Anak-anak		Dinas KBP3A
PD 4. Peningkatan masyarakat yang sejahtera	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBANGUNAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (IUP)	89,86 10,85	Penandaan Penurunan Stunting Kabupaten	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Masih adanya sanitasi permukiman yang kurang layak (bukan komunal)	Paket	Rp 80.000.000	Kriteria usulan : 1. masuk dalam dokumen SSK 2. Lokasi di prioritaskan desa stunting dan kemiskinan ekstrim 3. Calon penerima manfaat masuk DTKS. 4. Minimal 10 KK, septitank individu 8 Juta		Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

Prioritas	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2027	TEMATIK	KODE	SUB KEGIATAN	USULAN LENGKAP	CONTOH URAIAN PERMASALAHAN	SATUAN	ESTIMASI BIAYA	SYARAT DAN KETENTUAN	KET	OPD
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	90,95	Penandaaan Penurunan Stunting Kabupaten	1.03.03.2.01.002.3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	8 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	masih adanya wilayah kekeurangan air bersih yang layak dimusim kemarau	Paket	Rp 120.000.000	Kriteria usulan : 1. Bukan Layanan Perluasan PDAM, 2. Berada di wilayah RISPAM yang ber masyarakat berpenghasilan rendah. 3. Surat Pernyataan Hibah lahan dan surat minat dari desa calon penerima. 4. Sumur dalam 80-90 m dan mesin pompa, Sambungan Listrik .		Dinas Pekerjaan Umum
				Penandaaan Penurunan Stunting Kabupaten	1.03.03.2.01.002.6	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	masih adanya wilayah kekeurangan air bersih yang layak dimusim kemarau	Paket	Rp 120.000.000	Kriteria usulan : 1. Bukan Layanan Perluasan PDAM, 2. Berada di wilayah RISPAM yang ber masyarakat berpenghasilan rendah. 3. Surat Pernyataan Hibah lahan dan surat minat dari desa calon penerima. 4. Sumur dalam 80-90 m dan mesin pompa, Sambungan Listrik .		Dinas Pekerjaan Umum
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan tuna sosial (PGOT) yang	20%	Penandaaan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten	1.06.04.2.01.003	Penyediaan Alat Bantu	1 Pengadaan alat bantu penderita cacat (Walker) 2 Pengadaan alat bantu penderita cacat (Kruk) 3 Pengadaan alat bantu penderita cacat (Kursi Roda) 4 Pengadaan alat bantu penderita Cacat (Alat bantu Dengar Tipe I)	Orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama	unit pasang unit unit	Rp 700.000 Rp 500.000 Rp 2.000.000 Rp 1.700.000	Kriteria calon penerima : 1. Penyandang Disabilitas 2. Bantuan Berupa Barang (pengadaan dari dinas sosial) 3. Sudah termasuk biaya operasionalnya 4. Proposal Pengajuan dari Calon Penerima mengetahui Kepala Desa 5. Calon Penerima Manfaat tidak boleh menerima Bantuan Dua Tahun berturut turut	Dokumen RISPAM berlaku tahun 2025-2029 I. Permensos No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Jenis PMKS salah satunya adalah Penyandang Disabilitas)	Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial

Prioritas	PROGR AM	INDIKAT OR	TARGET 2027	TEMATIK	KODE	SUB KEGIATAN	USULAN LENGKAP	CONTOH URAIAN PERMASALAHAN	SATUAN	ESTIMASI BIAYA	SYARAT DAN KETENTUAN	KET	OPD
	Program Perlindungan dan jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	40%	Penandaan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten	1.06.05.2.02.004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi masyarakat	1 Bansos Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari	Orang	Rp 4.200.000	Kriteria calon penerima : 1. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang masuk DTSEN Desil 1-5 usia produktif (Tidak Lansia) 2. Bantuan dalam bentuk uang untuk modal Usaha 3. Biaya sudah termasuk BOP 4. Pengajuan Proposal calon penerima mengetahui kepala Desa 5. Calon Penerima Manfaat wajib menyertakan NIK 6. Calon Penerima Manfaat tidak boleh menerima Bantuan Dua Tahun berturut-turut		Dinas Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan tuna sosial (PGOT) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial di luar panti	20%	Penandaan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	2 Bansos untuk Lansia	Seorang Lansia Terlantar yang tidak mempunyai keluarga, dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk pemenuhan hidup sehari-hari	Orang	Rp 2.200.000	Kriteria calon penerima : 1. Lansia Terlantar yang tidak mempunyai keluarga (KK Tunggal) 2. Belum pernah dapat bantuan sama sekali baik PKH maupun BPNT 3. Pengajuan Proposal calon Penerima Manfaat mengetahui Kepala Desa 4. Lansia Terlantar masuk dalam DTSEN desil 1-5 5. Bantuan berupa uang tunai Rp. 2.000.000 di salurkan 2 tahap dengan BOP Rp. 200.000 6. Lansia Terlantar tidak boleh menerima bantuan sosial 2 tahun berturut-turut		Dinas Sosial
	Program Perlindungan dan jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	40%	Penandaan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3 Bansos untuk Anak Yatim	Seorang anak yatim, piatu, dhuafa yang tinggal di dalam panti yang tidak terpenuhi kebutuhan sekolahnya oleh orang tua/wali	Orang	Rp 600.000	Kriteria calon penerima : 1. Anak yatim, piatu, dhuafa yang tinggal dalam panti (LKSA) 2. Berdomisili di Kabupaten Sragen (Bukti KK) 3. Anak Usia Sekolah (N-1) berumur maksimal 17 Tahun 4. Bantuan berupa uang tunai Rp. 500.000 dan BOP Rp. 100.000		Dinas Sosial

Prioritas	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2027	TEMATIK	KODE	SUB KEGIATAN	USULAN LENGKAP	CONTOH URAIAN PERMASALAHAN	SATUAN	ESTIMASI BIAYA	SYARAT DAN KETENTUAN	KET	OPD
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan tuna sosial (PGOT) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial di luar panti	20%	Penandaa n Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten	1.06.04.2.01.001.0	Pemberian Layanan Kedaruratan	4 Bansos untuk Disabilitas	Seorang penyandang Disabilitas berat, mempunyai lebih dari 1 macam kedisabilitas dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk pemenuhan hidup sehari-hari	Orang	Rp 2.200.000	Kriteria calon penerima : 1. Penyandang Disabilitas Berat, mempunyai lebih dari 1 macam kedisabilitas 2. Belum pernah dapat bantuan sama sekali baik PKH maupun BPNT 3. Pengajuan Proposal calon penerima mengetahui kepala Desa 4. Penyandang Disabilitas Berat masuk dalam DTSEN desil 1-5 5. Bantuan berupa uang tunai Rp.2.000.000 di salurkan 2 tahap dengan BOP Rp. 200.000 6. Penyandang Disabilitas tidak boleh menerima bantuan sosial 2 tahun berturut-turut		Dinas Sosial
				Infrastruktur Pelayanan Publik Kabupaten Kota	1.04.03.2.03.002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Bantuan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni Tipe 2	unit	Rp 20.000.000	Kriteria calon penerima : a. Fakir miskin yang terdata dalam DTKS periode tertentu. b. Belum pernah memperoleh bantuan dari pemerintah baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan Badan/Institusi/Organisasi Non Pemerintah maupun sumber dana lainnya minimal 5 tahun. (masa layak bangunan 5 tahun) c. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga dan berdomisili sesuai KTP/setempat dan memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga. d. Memiliki dan menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni dengan minimal kerusakan 2 item (atap, lantai, dinding) dan/atau menguasai sebidang tanah yang dibuktikan dengan sertifikat, akta jual beli, girik/nama lain, atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah. e. Memiliki Rutilahu yang merupakan rumah induk/rumah utama yang peruntukannya sesuai dengan rencana tata		Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang

Prioritas	PROGR AM	INDIKAT OR	TARGET 2027	TEMATIK	KODE	SUB KEGIATAN	USULAN LENGKAP	CONTOH URAIAN PERMASALAHAN	SATUAN	ESTIMASI BIAYA	SYARAT DAN KETENTUAN	KET	OPD
								Digital Marketing (260 JP/32 hari)	paket	Rp54.212.000,00	3. Lulusan minimal SMA/SMK	Modul Seragam	Disnaker
								Konten Kreator (260 JP/32 hari)	paket	Rp54.212.000,00	4. Bisa mengoperasikan komputer dan/atau		Disnaker
							3 Kejuruan Teknik Las	Plat Welder SMAW 3G-Up/PP (320 JP/40 hari)	paket	Rp120.652.000,00	Kriteria calon peserta : 1. Satu paket pelatihan terdiri atas 16 (enam belas) peserta pelatihan	Fasilitas terdiri dari : Uang saku Makan ATK Peserta	Disnaker
							4 Kejuruan Teknik Otomotif	Plat Welder Pipe Welder SMAW 6G Up Hill/HLO 45 (420 JP/52 hari)	paket	Rp138.712.000,00	2. Masyarakat usia produktif (usia 18-55 tahun)	Modul	Disnaker
								Pemeliharaan Kendaraan Ringan Sistem Injeksi (272 JP/34 hari)	paket	Rp 60.612.000,00	Kriteria calon peserta : 1. Satu paket pelatihan terdiri atas 16 (enam belas) peserta pelatihan	Fasilitas terdiri dari : Uang saku Makan ATK Peserta	Disnaker
								Service Sepeda Motor Injeksi (240 JP/30 hari)	paket	Rp 60.612.000,00	2. Masyarakat usia produktif (usia 18-55 tahun)	Modul	Disnaker
							5 Kejuruan Teknik Refrigerasi	Pemeliharaan dan Perbaikan AC untuk Rumah Tangga (240 JP/30 hari)	paket	Rp 61.452.000,00	Kriteria calon peserta : 1. Satu paket pelatihan terdiri atas 16 (enam belas) peserta pelatihan	Fasilitas terdiri dari : Uang saku Makan ATK Peserta Modul Seragam	Disnaker
							6 Kejuruan Bisnis dan Manajemen	English For Frontliner (160 JP/ 20 hari)	paket	Rp 40.652.000,00	2. Masyarakat usia produktif (usia 18-55 tahun)	Rincian penganggaran: Uang saku Makan ATK Peserta Modul Seragam	Disnaker
								Pengelola Administrasi Perkantoran (240 JP/30 hari)	paket	Rp 51.452.000,00	3. Lulusan minimal SLTP 4. Sehat jasmani dan rohani 5. Tidak sedang bekerja 6. Tidak sedang menempuh pendidikan formal 7. Tersedia prasarana pelatihan 8. Disabilitas non fisik boleh mengikuti pelatihan dengan pendamping 9. Tanpa bantuan alat	ATK Penyelenggara Fasilitas terdiri dari : Uang saku Makan ATK Peserta Modul Seragam	Disnaker
							7 Kejuruan Prosesing	Pembuatan Aneka Roti dan Kue (160 JP/20 hari)	paket	Rp 42.652.000,00	Kriteria calon peserta : 1. Satu paket pelatihan terdiri atas 16 (enam belas) peserta pelatihan	Fasilitas terdiri dari : Uang saku Makan ATK Peserta Modul Seragam	Disnaker
											2. Masyarakat usia produktif (usia 18-55 tahun)	Rincian penganggaran: Uang saku Makan ATK Peserta Modul Seragam	Disnaker
											3. Lulusan minimal SLTP 4. Sehat jasmani dan rohani 5. Tidak sedang bekerja 6. Tidak sedang menempuh pendidikan formal 7. Tersedia prasarana pelatihan 8. Tanpa bantuan alat.	ATK Penyelenggara	Disnaker
	PROGRA M PENING KATAN DIVERSI FIKASI DAN KETAHA NAN PANGAN MASYAR AKAT	Angka Kecukup an Energi (AKE) kkal/kapit a/hari	2,105	Penuruna n Stunting Kabupaten Kota	2.09.03. 2.04.000 2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	KRPL dapat sebagai sumber kebutuhan pangan dan gizi keluarga, Mencegah stunting, serta peningkatan pendapatan keluarga	paket	Rp 36.000.000	Kriteria calon penerima : 1. Penerima manfaat adalah KWT 2. Setiap kelompok anggota minimal 20 orang, 3. Kelompok Tani sudah terdaftar SK Bupati, 4. bersedia menyediakan Lahan untuk kebun bibit. 5. Komponen KRPL : Kebun Bibit ,Polybag, bibit tanaman, pupuk, 6. Sudah termasuk biaya operasinya		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Prioritas	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2027	TEMATIK	KODE	SUB KEGIATAN	USULAN LENGKAP	CONTOH URAIAN PERMASALAHAN	SATUAN	ESTIMASI BIAYA	SYARAT DAN KETENTUAN	KET	OPD
				Penurunan Stunting Kabupaten Kota	2.09.03.2.04.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Pengadaan bibit Hortikultura dan perkebunan	Pengadaan bibit Alpukat, Pengadaan Bibit Durian, Pengadaan bibit Kelapa Genjah Entok	paket	Rp 50.000.000	Kriteria calon penerima : 1. Kelompok tani sudah terdaftar SK Bupati 2. Memiliki lahan Demplot atau dapat ditanam di tanah pekarangan anggota 3. bantuan berupa bibit dan pupuk dan Biaya Operasional		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
							2 pemberantasan hama tikus	Produksi pertanian menurun	paket	Rp 20.000.000	Kriteria calon penerima : 1. Kelompok penerima wajib terdaftar dalam SK Bupati 2. Kelompok penerima adalah di daerah terserang hama tikus 3. bantuan berupa: Rubuha (Rumah Burung hantu) , Rodentisida dan Emposan		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Sragen, 4 Desember 2025



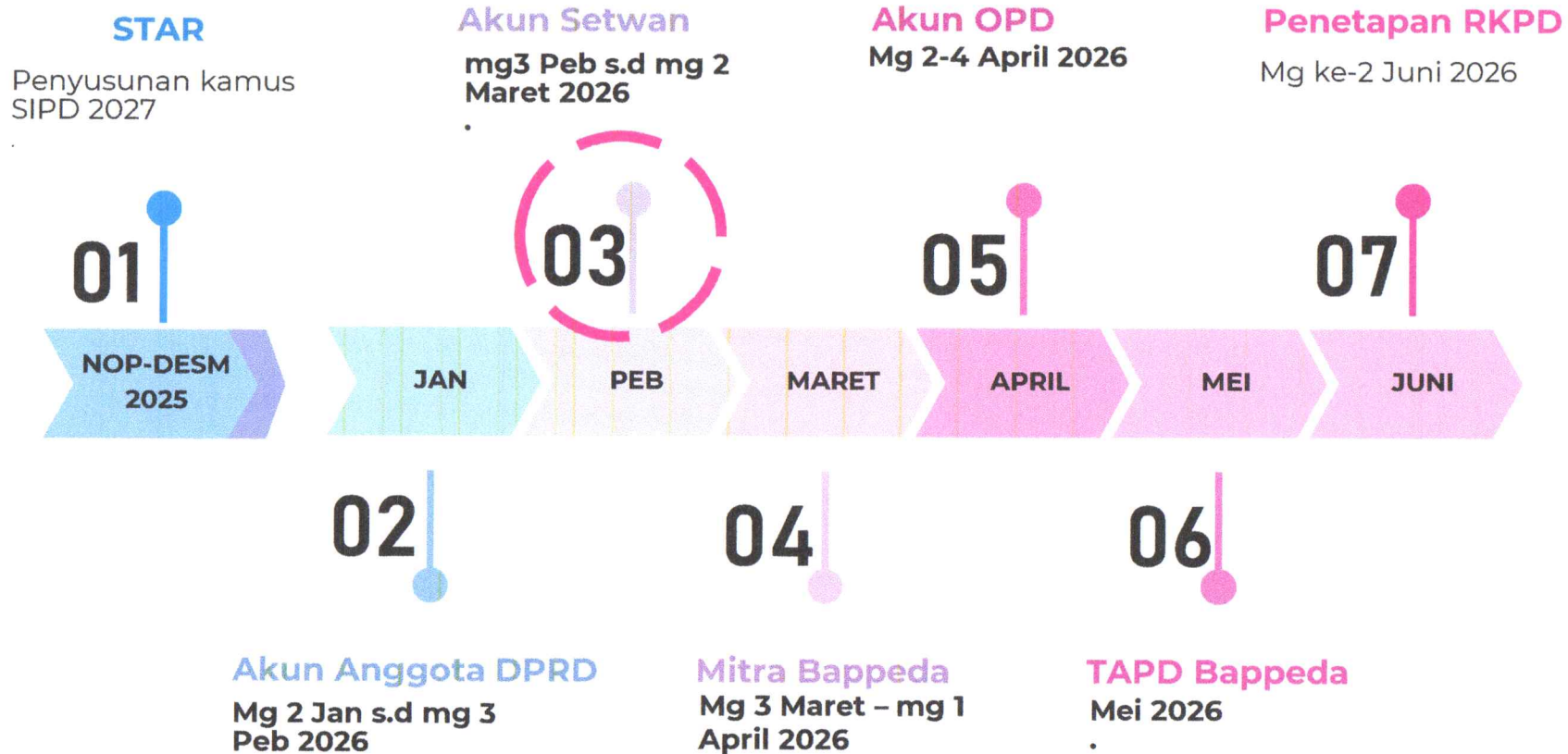
BUPATI SRAGEN



SIGIT PAMUNGKAS

Timeline

- VERIFIKASI USULAN POKIR DPRD 2027-



TUGAS DAN PERAN ADMIN

- VERIFIKASI POKIR 2027-

